

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG PEMILIHAN UMUM RAYA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

No	Indikator	Permasalahan	Penyelesaian
1.	Judul dan Frasa Pembuka,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperlukan judul peraturan 2. Diperlukan frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa". 3. Diperlukan nama lembaga pembentuk peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dicantumkan judul rancangan peraturan, yakni "Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor ... Tahun ... Tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2. Dicantumkan frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa". 3. Dicantumkan frasa "Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro".
2.	Konsiderans	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperlukan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam membentuk Perma FH Undip yang betul-betul menggambarkan kondisi dan kebutuhan hukum kali ini. 	<p>Dicantumkan konsiderans di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk mencapai tujuan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang demokratis dan ideal demi memberikan kebaikan sebesar-besarnya kepada mahasiswa maka perlu diselenggarakannya Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; b. bahwa demi menghasilkan senator Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta Ketua dan Wakil Ketua

			<p>Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berkualitas dan mampu menciptakan kemanfaatan kepada mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;</p> <p>c. bahwa untuk menjalankan roda Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang demokratis melalui pergantian kepemimpinan secara sistematis dan prosedural yang terstruktur melalui mekanisme Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;</p> <p>d. bahwa Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2023 perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan perlu diharmonisasikan dengan peraturan yang berlaku;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</p>
3.	Dasar Hukum	Diperlukan dasar hukum sebagai landasan yuridis dalam membentuk Perma FH Undip kali ini sekaligus	Dicantumkan beberapa peraturan yang menjadi dasar dalam pembentukan Perma FH Undip kali ini:

		wujud harmonisasi peraturan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 58 dan Pasal 59 Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Tahun 2017 Perubahan Kedua; 2. Garis Besar Haluan Keorganisasian Universitas Diponegoro 3. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan.
4.	Ketentuan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa ketentuan umum dalam Perma FH Undip tentang Pemira yang sekarang berlaku diperlukan harmonisasi dengan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro lainnya. 2. Terdapat beberapa ketentuan yang belum diatur secara jelas di dalam 	<p>Diatur ketentuan lebih lanjut, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut dengan Pemira FH Undip adalah salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Senator Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2. Penyelenggaraan Pemira FH Undip adalah pelaksanaan tahapan-tahapan Pemira FH Undip yang diselenggarakan oleh Perangkat Pemira FH Undip

		<p>ketentuan umum Perma FH Undip tentang Pemira yang sekarang berlaku, sehingga perlu ditambahkan beberapa ketentuan untuk membatasi hal-hal lain, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Ormawa FH Undip;b. KPPR FH Undip Inti;c. BPPR FH Undip Inti;d. Verifikasi DPT;e. Verifikasi Syarat	<ul style="list-style-type: none">3. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Dekanat FH Undip adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan/atau jajarannya yang menaungi bagian akademik dan kemahasiswaan serta bagian sumber daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.4. Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Ormawa FH Undip adalah organisasi kemahasiswaan yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro5. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menjalankan kekuasaan legislatif mahasiswa serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.6. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BEM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menjalankan kekuasaan eksekutif mahasiswa serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip, SM FH Undip, dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
--	--	--	--

			<ol style="list-style-type: none">7. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut UKM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berfungsi sebagai penunjang aktivitas kemahasiswaan dan menaungi lingkup tertentu serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip dan SM FH Undip.8. Panitia Seleksi Pemira FH Undip yang selanjutnya disebut Pansel FH Undip adalah panitia yang dibentuk oleh BEM FH Undip dan SM FH Undip yang bertugas untuk memilih Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Inti, Badan Pengawas Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Inti, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Tim Pengawas Keuangan Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya ditetapkan melalui surat keputusan SM FH Undip.9. Perangkat Pemira FH Undip adalah keseluruhan jenis lembaga yang menyelenggarakan pelaksanaan Pemira FH Undip10. Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut sebagai
--	--	--	---

			<p>KPPR FH Undip adalah lembaga penyelenggara Pemira FH Undip yang bersifat <i>ad hoc</i> dan bertanggung jawab kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melalui SM FH Undip.</p> <p>11. Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Inti yang selanjutnya disebut sebagai KPPR FH Undip Inti adalah ketua, wakil ketua, sekretaris jenderal, bendahara, dan sekretaris KPPR FH Undip yang dipilih oleh Pansel FH Undip.</p> <p>12. Badan Pengawas Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BPPR FH Undip adalah lembaga pengawas penyelenggara Pemira FH Undip yang bersifat <i>ad hoc</i> dan bertanggung jawab kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melalui SM FH Undip.</p> <p>13. Badan Pengawas Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Inti yang selanjutnya disebut BPPR FH Undip Inti adalah ketua, wakil ketua, sekretaris jenderal, bendahara, dan sekretaris BPPR FH Undip yang dipilih oleh Pansel FH Undip.</p> <p>14. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya</p>
--	--	--	---

			<p>disebut DKPPR FH Undip adalah lembaga penegak kehormatan dan keluhuran Perangkat Pemira FH Undip yang dipilih oleh Pansel FH Undip dengan bersifat <i>ad hoc</i> dan bertanggung jawab kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melalui SM FH Undip</p> <p>15. Tim Pengawas Keuangan Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut sebagai TPK FH Undip adalah lembaga pengawas keuangan dalam penyelenggaraan Pemira FH Undip yang dipilih oleh Pansel FH Undip dengan bersifat <i>ad hoc</i> dan bertanggung jawab kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melalui SM FH Undip.</p> <p>16. Tim Yudisial Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut TY FH Undip adalah lembaga <i>ad hoc</i> yang bertugas untuk menyelesaikan Sengketa Hasil Pemira FH Undip dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemira FH Undip tingkat akhir serta bertanggung jawab kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Dekanat FH Undip</p> <p>17. Peserta Pemira FH Undip adalah Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dan Calon Senator SM FH Undip.</p>
--	--	--	--

			<p>18. Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip adalah pasangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang mencalonkan diri dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan ini.</p> <p>19. Calon Senator SM FH Undip adalah perseorangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang mencalonkan diri dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan ini</p> <p>20. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah orang perorangan yang sedang aktif menjalani pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dibuktikan melalui surat keterangan aktif yang dikeluarkan oleh Dekanat FH Undip.</p> <p>21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar identitas diri Mahasiswa yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetap untuk memilih Peserta Pemira FH Undip pada tahap pemungutan suara Pemira FH Undip yang ditetapkan oleh KPPR FH Undip.</p> <p>22. Pemilih adalah Mahasiswa yang terdaftar dalam DPT.</p> <p>23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.</p>
--	--	--	--

			<p>24. Kampanye Pemira FH Undip adalah kegiatan Peserta Pemira FH Undip atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemira untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemira terkait.</p> <p>25. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemira FH Undip</p> <p>26. Verifikasi DPT adalah proses pengumpulan dan peninjauan ulang data-data Mahasiswa untuk kebutuhan penetapan DPT oleh KPPR FH Undip.</p> <p>27. Verifikasi Syarat adalah proses pemeriksaan, penelitian, pelengkapan, peninjauan ulang, dan penetapan yang dilakukan oleh KPPR FH Undip terhadap calon Peserta Pemira FH Undip atas pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan ini.</p> <p>28. Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah tahapan Pemira FH Undip yang dilaksanakan untuk memungut dan menghitung suara berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini</p> <p>29. Penetapan Hasil Pemira FH Undip adalah tahapan Pemira FH Undip yang dilaksanakan untuk menetapkan hasil perolehan suara Pemira FH Undip yang dilakukan secara terbuka oleh KPPR FH Undip.</p>
--	--	--	---

			<p>30. Pelanggaran adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.</p> <p>31. Sengketa Proses adalah sengketa yang timbul dalam proses penyelenggaraan Pemira FH Undip mencakup sengketa antar Peserta Pemira FH Undip atau sengketa antara Peserta Pemira FH Undip dengan Perangkat Pemira FH Undip sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan KPPR FH Undip.</p> <p>32. Sengketa Hasil adalah sengketa yang timbul akibat Penetapan Hasil Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip.</p> <p>33. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.</p> <p>34. Hari adalah hari kalender.</p>
	<p>Asas dan Tujuan</p>	<p>Diperlukan satu bab tersendiri tentang asas dan tujuan yang akan menjadi pokok aturan dalam Perma FH Undip kali ini. Di mana tujuan dalam Perma FH Undip tentang Pemira yang sekarang berlaku juga masih terbatas kepada pemilihan Ketua/Wakil Ketua BEM FH Undip dan Senator SM FH Undip saja.</p>	<p>Diatur ketentuan lebih lanjut, yakni:</p> <p>Penyelenggaraan Pemira FH Undip dilaksanakan berlandaskan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. langsung; b. umum; c. bebas; d. rahasia; e. jujur; f. adil; dan g. proporsionalitas perwakilan.

		<p>Padahal dikatakan dalam PPO Undip bahwa salah satu tujuan Pemilihan Umum Raya adalah sebagai pembelajaran untuk berdemokrasi.</p>	<p>Penyelenggaraan Pemira FH Undip bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memilih Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip serta Calon Senator SM FH Undip; dan b. mewujudkan sistem demokrasi dengan prinsip kedaulatan mahasiswa secara langsung.
	<p>Hak, Wewenang, dan Tugas Ormawa FH Undip</p>	<p>Belum adanya ketentuan yang mengatur secara jelas mengenai hak, wewenang, dan tugas Ormawa FH Undip. Dalam hal ini hak, wewenang, dan kewajiban dirasa perlu untuk diatur karena berkaitan dengan pelaksanaan Pemira FH Undip, khususnya tentang pembentukan Pansel FH Undip, TY FH Undip, Senator Delegasi UKM FH dan Mekanisme Alternatif. Sementara itu, hak dan kewajiban dari mahasiswa pun belum ada aturan yang pasti.</p>	<p>Diatur ketentuan lebih lanjut, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SM FH Undip memiliki dan wewenang untuk: <ul style="list-style-type: none"> - memberikan surat peringatan kepada BEM FH Undip untuk dapat segera membentuk dan memberikan nama-nama calon anggota Pansel FH Undip kepada SM FH Undip; - memberikan rekomendasi nama-nama calon anggota Pansel FH Undip apabila BEM FH Undip belum memberikan nama-nama calon anggota Pansel FH Undip dalam kurun waktu 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya surat peringatan oleh SM FH Undip; - menyusun indikator penilaian uji kelayakan dan kepatutan untuk nama-nama calon anggota Pansel FH Undip yang diberikan oleh BEM FH Undip; dan - memberikan tafsiran atas norma yang diatur dalam peraturan ini melalui surat keputusan SM FH Undip

			<p>dalam hal ditemukannya norma yang dianggap kurang jelas.</p> <p>b. SM FH Undip memiliki tugas untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">- melakukan koordinasi dengan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro atas waktu penyelenggaraan pemilihan umum raya universitas diponegoro;- melakukan koordinasi dengan Perangkat Pemira FH Undip dalam hal penyelenggaraan Pemira FH Undip;- melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk menyeleksi nama-nama calon anggota Pansel FH Undip yang diberikan oleh BEM FH Undip;- mengirimkan satu orang perwakilan untuk menjadi anggota TY FH Undip;- menetapkan nama-nama anggota Pansel FH Undip melalui surat keputusan SM FH Undip dan menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan ini;- melantik Perangkat Pemira FH Undip terpilih menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan ini;- menyelenggarakan pelatihan TY FH Undip setelah ditetapkannya TY FH Undip oleh Dekanat FH Undip;
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none">- mengeluarkan surat cuti bagi anggota SM FH Undip yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon Peserta Pemira FH Undip; dan- mendukung pelaksanaan Pemira FH Undip sesuai dengan ketentuan yang berlaku. <p>c. BEM FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk menyusun serta membentuk nama-nama calon anggota Pansel FH Undip untuk diberikan kepada SM FH Undip.</p> <p>d. BEM FH Undip memiliki tugas untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">- memberikan nama-nama calon anggota Pansel FH Undip kepada SM FH Undip;- menindaklanjuti rekomendasi nama-nama calon anggota Pansel FH Undip yang diberikan oleh SM FH Undip;- menyelenggarakan rangkaian rekrutmen terbuka sebagai bentuk fasilitas Pansel FH Undip untuk memilih anggota KPPR FH Undip Inti, BPPR FH Undip Inti, DKPPR FH Undip, dan TPK FH Undip;- mengirimkan satu orang perwakilan untuk menjadi anggota TY FH Undip;
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none">- mengeluarkan surat cuti bagi anggota BEM FH Undip yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon Peserta Pemira FH Undip; dan- mendukung pelaksanaan Pemira FH Undip sesuai dengan ketentuan yang berlaku. <p>e. UKM FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">- menyusun mekanisme penilaian untuk memilih satu orang perwakilan UKM FH Undip terkait untuk menjadi Calon Senator SM FH Undip; dan- mengirimkan satu orang perwakilan untuk menjadi Calon Senator SM FH Undip menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan ini. <p>f. UKM FH Undip memiliki tugas untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">- mengeluarkan surat cuti bagi anggota UKM-F terkait yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon Peserta Pemira FH Undip;- mengirimkan satu orang perwakilan untuk menjadi calon anggota TY FH Undip kepada SM FH Undip menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan ini;- melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemira FH Undip; dan
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none">- mendukung Penyelenggaraan Pemira FH Undip sesuai dengan ketentuan yang berlaku. <p>g. Mahasiswa memiliki hak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">- mendapatkan informasi seputar Pemira FH dari KPPR FH baik secara daring maupun luring;- mendaftarkan diri sebagai calon anggota Pansel FH Undip;- mendaftarkan diri sebagai calon anggota Perangkat Pemira FH Undip;- mendaftarkan diri sebagai calon Peserta Pemira FH Undip;- dipilih sebagai calon anggota TY FH Undip, baik melalui perwakilan SM FH Undip, BEM FH Undip, atau UKM FH Undip;- turut serta dalam melakukan Kampanye Pemira FH Undip untuk meyakinkan Pemilih atas salah satu Peserta Pemira FH Undip;- menghadiri Kampanye Pemira FH Undip yang diadakan oleh Peserta Pemira FH Undip;- memberikan kesaksian dalam penyelesaian Sengketa Proses dan Sengketa Hasil Pemira FH Undip; dan
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - memilih Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip serta Calon Senator SM FH Undip dalam tahap pemungutan suara. h. Penggunaan hak oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang berlaku. i. Mahasiswa memiliki kewajiban untuk menaati ketentuan yang diatur dalam peraturan ini demi terselenggaranya Pemira FH Undip yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan proporsionalitas perwakilan
	Perangkat Pemira FH Undip	Aturan mengenai Perangkat Pemira FH Undip dalam Perma FH Undip tentang Pemira yang sekarang berlaku masih belum disusun secara runtut, misalnya ketentuan mengenai KPPR FH Undip yang belum dipisahkan dengan KPPR FH Undip Inti, BPPR FH Undip yang belum diatur tersendiri dengan BPPR FH Undip Inti, serta belum adanya mekanisme pemberhentian anggota Perangkat Pemira FH Undip	<p>Diatur ketentuan yang bersifat umum lebih lanjut, yakni:</p> <p>Perangkat Pemira FH Undip terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. KPPR FH Undip; b. BPPR FH Undip; c. DKPPR FH Undip; dan d. TPK FH Undip. <p>Diatur ketentuan susunan dan jumlah keanggotaan, yakni:</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p>Jumlah keanggotaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. KPPR FH Undip Inti sebanyak 5 (lima) orang; b. BPPR FH Undip Inti sebanyak 5 (lima) orang;

		<p>itu sendiri.</p> <p>Di samping itu, pembentukan Panitia Seleksi FH Undip (Pansel FH Undip) juga belum bisa mewadahi peran SM FH Undip sebagai lembaga legislatif yang menjadi representasi dari mahasiswa itu sendiri. Oleh sebabnya, peran SM FH Undip dalam pembentukan Pansel FH Undip lebih dimanfaatkan melalui mekanisme checks and balance dalam pemilihan anggota Pansel FH Undip.</p>	<p>c. DKPPR FH Undip sebanyak 5 (lima) orang; dan</p> <p>d. TPK FH Undip sebanyak 3 (tiga) orang.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 2 KPPR FH Undip</p> <p>(1) KPPR FH Undip Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris jenderal, bendahara, dan sekretaris.</p> <p>(2) KPPR FH Undip Inti berhak menentukan jumlah anggota KPPR FH Undip.</p> <p>(3) Susunan keanggotaan KPPR FH Undip dipilih dan dibentuk oleh KPPR FH Undip Inti.</p> <p>(4) KPPR FH Undip wajib membentuk biro KPPR FH Undip.</p> <p>(5) Sekretaris jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memberikan arahan kepada biro KPPR FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (4)</p> <p>(6) Biro KPPR FH Undip sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) terdiri dari biro hukum, biro media, biro logistik, dan biro umum.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 3 BPPR FH Undip</p>
--	--	---	---

			<p>(1) BPPR FH Undip Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris jenderal, bendahara, dan sekretaris.</p> <p>(2) BPPR FH Undip Inti berhak menentukan jumlah anggota BPPR FH Undip.</p> <p>(3) Susunan keanggotaan BPPR FH Undip dipilih dan dibentuk oleh BPPR FH Undip Inti.</p> <p>(4) BPPR FH Undip Inti wajib membentuk biro BPPR FH Undip.</p> <p>(5) Sekretaris jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memberikan komando kepada biro BPPR FH Undip.</p> <p>(6) Biro BPPR FH Undip terdiri dari biro hukum, biro media, dan biro administrasi.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 4 DKPPR FH Undip</p> <p>DKPPR FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri dari seorang ketua yang merangkap anggota dan 4 (empat) anggota.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 5 TPK FH Undip</p> <p>TPK FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terdiri</p>
--	--	--	---

			<p>dari seorang ketua yang merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.</p> <p>Diatur ketentuan lebih lanjut tentang hak, wewenang, dan tugas Perangkat Pemira FH Undip:</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 KPPR FH Undip</p> <p>KPPR FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">a. menetapkan calon Peserta Pemira FH Undip yang lolos dan tidak lolos Verifikasi Syarat;b. menetapkan lini masa Penyelenggaraan Pemira FH Undip;c. menetapkan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;d. menetapkan hasil Pemira FH Undip; dane. menindaklanjuti putusan BPPR FH Undip dan TY FH Undip. <p>KPPR FH Undip memiliki tugas untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemira FH Undip;b. membuat tata tertib yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemira FH Undip;c. menyampaikan laporan secara tertulis perihal perencanaan,
--	--	--	--

			<p>persiapan, dan pelaksanaan Pemira FH Undip kepada Ketua BEM FH Undip;</p> <ul style="list-style-type: none">d. memberikan informasi perkembangan Pemira FH Undip kepada Mahasiswa melalui SM FH Undip;e. melakukan sosialisasi secara terbuka mengenai Pemira FH Undip kepada Mahasiswa;f. melakukan Verifikasi Syarat terhadap calon Peserta Pemira FH Undip;g. melakukan Verifikasi DPT;h. mempublikasikan atau mensosialisasikan para Peserta Pemira FH Undip kepada publik; dani. menindaklanjuti surat rekomendasi TPK FH Undip atas laporan sumber dana dan penggunaan dana Kampanye Pemira FH Undip Peserta Pemira FH Undip. <p style="text-align: center;">Paragraf 2 Biro KPPR FH Undip</p> <p>(1) Biro hukum KPPR FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menetapkan peraturan dan keputusan mengenai petunjuk teknis Pemira FH Undip; danb. melakukan koordinasi dengan SM FH Undip dalam
--	--	--	--

			<p>pembentukan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a.</p> <p>(2) Biro media KPPR FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk melakukan hubungan keluar dengan pemangku kebijakan terkait</p> <p>(3) Biro logistik KPPR FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk mempertimbangkan kebutuhan pengadaan barang untuk penyelenggaraan Pemira FH Undip</p> <p>(4) Biro umum KPPR FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengelola rangkaian urusan rumah tangga KPPR FH Undip; danb. menyusun rangkaian acara Pemira FH Undip; <p>(1) Biro hukum KPPR FH Undip memiliki tugas untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. melakukan pengkajian administrasi hukum Peserta Pemira FH Undip;b. bertanggung jawab atas pengarsipan segala peraturan dan keputusan yang dihasilkan oleh KPPR FH Undip; danc. melakukan sosialisasi peraturan tentang petunjuk teknis Pemira FH Undip.
--	--	--	--

			<p>(2) Biro media KPPR FH Undip memiliki tugas untuk melakukan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemira FH Undip kepada Mahasiswa.</p> <p>(3) Biro logistik KPPR FH Undip memiliki tugas untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menyusun alokasi barang dan/atau platform kebutuhan Pemira FH Undip;b. melakukan pengadaan barang dan/atau platform; danc. memelihara dan menginventarisasi sarana dan prasarana Pemira FH Undip <p>(4) Biro umum KPPR FH Undip memiliki tugas untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menyelenggarakan tahapan Penyelenggaraan Pemira FH Undip; danb. melakukan penghitungan suara Peserta Pemira FH Undip. <p style="text-align: center;">Paragraf 3 BPPR FH Undip</p> <p>BPPR FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip;b. memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip;
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none">c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan setiap dugaan Sengketa Proses Pemira FH Undip yang dilakukan oleh antar Peserta Pemira FH Undip maupun antara Peserta Pemira FH Undip dengan Perangkat Pemira FH Undip; dand. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip dan Sengketa Proses Pemira FH Undip.<ul style="list-style-type: none">a. BPPR FH Undip memiliki tugas untuk:b. mengawasi setiap tahapan Pemira FH Undip serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua SM FH Undip dan Ketua BEM FH Undip secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;c. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:d. pelanggaran Pemira FH Undip; dane. sengketa proses Pemira FH Undip.f. mengawasi KPPR FH Undip dalam menjalankan Verifikasi Syarat terhadap Peserta Pemira FH Undip;g. melaporkan setiap dugaan Pelanggaran etika Pemira FH Undip yang dilakukan oleh Perangkat Pemira FH Undip kepada DKPPR FH Undip; dan
--	--	--	--

			<p>h. melaporkan hasil putusan Sengketa Proses dan Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip kepada KPPR FH Undip agar dilakukan tindak lanjut.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 4 Biro BPPR FH Undip</p> <p>(1) Biro media BPPR FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk melakukan hubungan keluar terhadap pemangku kebijakan.</p> <p>(2) Biro hukum BPPR FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk mempertimbangkan upaya hukum apabila adanya dugaan Pelanggaran dan/atau Sengketa Proses Pemira FH Undip.</p> <p>(3) Biro administrasi BPPR FH Undip memiliki wewenang untuk melakukan koordinasi dengan BPPR FH Undip Inti terkait tindak lanjut aduan yang telah direkapitulasi.</p> <p>(1) Biro media BPPR FH Undip memiliki tugas untuk melakukan pemberitaan dan penerbitan informasi Pengawasan Pemira FH Undip kepada Mahasiswa.</p> <p>(2) Biro hukum BPPR FH Undip memiliki tugas untuk:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. menganalisis peraturan terkait; dan</p>
--	--	--	--

			<p>b. melakukan pemantauan atas tindak lanjut keputusan BPPR FH Undip dan DKPPR FH Undip.</p> <p>(3) Biro administrasi BPPR FH Undip memiliki tugas untuk:</p> <p>a. mencatat aduan terkait Pemira FH Undip; dan</p> <p>b. merekapitulasi aduan;</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 5 DKPPR FH Undip</p> <p>DKPPR FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk:</p> <p>a. memanggil anggota Perangkat Pemira FH Undip yang diduga melakukan Pelanggaran etika untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;</p> <p>b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan</p> <p>c. memberikan sanksi kepada anggota Perangkat Pemira FH Undip yang terbukti melakukan Pelanggaran Etika.</p> <p>DKPPR FH Undip memiliki tugas untuk:</p> <p>a. menyusun dan menetapkan satu kode etik yang memiliki kekuatan hukum untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas untuk seluruh anggota Perangkat Pemira FH Undip;</p>
--	--	--	---

			<p>b. melakukan sosialisasi terhadap kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada seluruh anggota Perangkat Pemira FH Undip;</p> <p>c. melakukan sidang untuk memeriksa dan memutus adanya aduan Pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota Perangkat Pemira FH Undip;</p> <p>d. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya Pelanggaran etika oleh anggota Perangkat Pemira FH Undip;</p> <p>e. melakukan pemeriksaan dan memutus serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya Pelanggaran etika oleh anggota Perangkat Pemira FH Undip; dan</p> <p>f. menyampaikan hasil putusan DKPPR FH Undip kepada publik.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 6 TPK FH Undip</p> <p>a. TPK FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk:</p> <p>b. menentukan objek pemeriksaan, waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;</p> <p>c. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh KPPR FH Undip dan Peserta Pemira FH Undip;</p> <p>d. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai</p>
--	--	--	---

			<p>pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan yang wajib disampaikan kepada KPPR FH Undip dan Peserta Pemira FH Undip;</p> <ul style="list-style-type: none">e. menetapkan standar pemeriksaan keuangan Peserta Pemira FH Undip dalam pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggungjawab keuangan Peserta Pemira FH Undip;f. menetapkan kode etik pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Peserta Pemira FH Undip; dang. memberikan peringatan bila ditemukan adanya penyelewengan oleh Peserta Pemira FH Undip yang diperiksa. <p>TPK FH Undip memiliki tugas untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh KPPR FH Undip dan Peserta Pemira FH Undip mencakup pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan;b. melakukan pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan KPPR FH Undip dan daftar Peserta Pemira FH Undip;
--	--	--	--

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none">c. menerima laporan keuangan dari Peserta Pemira FH Undip;d. memberikan surat rekomendasi kepada KPPR FH Undip untuk menolak atau menerima laporan sumber dana dan penggunaan dana Kampanye Pemira FH Undip dari Peserta Pemira FH Undip; dane. melaporkan hasil pemeriksaan penyelewengan keuangan oleh KPPR FH Undip dan/atau Peserta Pemira FH Undip kepada BPPR FH Undip. |
|--|--|--|---|

Bagian Keempat

Persyaratan

(1) Syarat umum untuk menjadi calon anggota Perangkat Pemira FH Undip adalah:

- a. bukan merupakan pimpinan SM FH Undip, BEM FH Undip, dan UKM FH Undip;
- b. tidak pernah mendapatkan sanksi akademik;
- c. tidak mendaftarkan diri atau sedang menjadi Peserta Pemira FH Undip dan/atau pemilihan umum raya tingkat Universitas Diponegoro;
- d. bersedia hadir di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan
- e. bersedia mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh

			<p>DKPPR FH Undip melalui surat pernyataan tertulis.</p> <p>(2) Syarat tambahan untuk menjadi KPPR FH Undip Inti, BPPR FH Undip Inti dan TPK FH Undip adalah berstatus sebagai Mahasiswa minimal semester 3 (tiga) dan maksimal semester 5 (lima).</p> <p>(3) Syarat tambahan untuk menjadi DKPPR FH Undip adalah berstatus sebagai Mahasiswa minimal semester 5 (lima) dan maksimal semester 7 (tujuh).</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kelima</p> <p style="text-align: center;">Pengangkatan Anggota Perangkat Pemira FH Undip</p> <p>(1) BEM FH Undip menyusun dan membentuk paling sedikit 7 (tujuh) nama calon anggota Pansel FH Undip untuk diberikan kepada SM FH Undip melalui surat permohonan BEM FH Undip.</p> <p>(2) Calon anggota Pansel FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none">a. berstatus sebagai Mahasiswa semester 7 (tujuh);b. bukan merupakan anggota BEM FH Undip maupun SM FH Undip; danc. memahami tugas tiap-tiap Perangkat Pemira FH Undip dan mekanisme Penyelenggaraan Pemira FH Undip.
--	--	--	--

			<p>(3) Surat permohonan BEM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum masa keanggotaan BEM FH Undip dan SM FH Undip berakhir.</p> <p>(4) Dalam hal BEM FH Undip belum memberikan paling sedikit 7 (tujuh) nama calon anggota Pansel FH Undip hingga waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SM FH Undip berhak memberikan surat peringatan kepada BEM FH Undip untuk segera mengirimkan nama calon anggota Pansel FH Undip dalam kurun waktu 7 (tujuh) Hari.</p> <p>(5) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BEM FH Undip belum juga memberikan paling sedikit 7 (tujuh) nama calon anggota Pansel FH Undip, SM FH Undip berhak memberikan rekomendasi nama calon anggota Pansel FH Undip kepada BEM FH Undip.</p> <p>(1) SM FH Undip bertugas untuk menyeleksi calon anggota Pansel FH Undip yang telah diberikan oleh BEM FH Undip melalui uji kelayakan dan kepatutan.</p> <p>(2) Proses penyeleksian calon anggota Pansel FH Undip oleh SM FH Undip wajib bersifat adil, transparan, dan berdasarkan</p>
--	--	--	--

			<p>penilaian yang objektif.</p> <p>(3) SM FH Undip menetapkan 5 (lima) calon anggota Pansel FH Undip menjadi anggota Pansel FH Undip terpilih berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Penetapan anggota Pansel FH Undip dilakukan melalui surat keputusan SM FH Undip dan wajib dipublikasikan melalui media digital yang bisa diakses oleh Mahasiswa.</p> <p>(5) Dalam kurun waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari setelah surat keputusan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan, anggota Pansel FH Undip wajib menentukan ketua Pansel FH Undip.</p> <p>(6) Ketua Pansel FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih dari dan oleh anggota Pansel FH Undip berdasarkan musyawarah mufakat.</p> <p>(1) Pansel FH Undip bertugas untuk memilih dan menyeleksi calon anggota KPPR FH Undip Inti, BPPR FH Undip Inti, DKPPR FH Undip, dan TPK FH Undip.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pansel FH Undip wajib bersifat independen, adil, dan melibatkan partisipasi Mahasiswa.</p> <p>(3) Pemilihan dan penyeleksian calon anggota KPPR FH Undip</p>
--	--	--	--

			<p>Inti, BPPR FH Undip Inti, DKPPR FH Undip, dan TPK FH Undip oleh Pansel FH Undip dilakukan melalui tahapan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. mempublikasikan pemberitahuan rekrutmen terbuka secara luring/daring dengan berkoordinasi kepada BEM FH Undip;b. menerima pendaftaran calon anggota KPPR FH Undip Inti, BPPR FH Undip Inti, DKPPR FH Undip, dan TPK FH Undip;c. melakukan penelitian administrasi calon anggota KPPR FH Undip Inti, BPPR FH Undip Inti, DKPPR FH Undip, dan TPK FH Undip; dand. melakukan seleksi tertulis dan/atau wawancara tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pemira FH Undip. <p>(4) Hasil pemilihan dan penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa nama calon anggota KPPR FH Undip Inti, BPPR FH Undip Inti, DKPPR FH Undip, dan TPK FH Undip terpilih selanjutnya diserahkan kepada SM FH Undip untuk dapat ditetapkan melalui surat keputusan SM FH Undip.</p> <p>Masa kerja Pansel FH Undip dianggap selesai bertepatan dengan dilantiknya anggota KPPR FH Undip Inti, BPPR FH Undip Inti, DKPPR</p>
--	--	--	---

			<p>FH Undip, dan TPK FH Undip oleh SM FH Undip.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keenam</p> <p style="text-align: center;">Pemberhentian Anggota Perangkat Pemira FH Undip</p> <p>(1) Anggota Perangkat Pemira FH Undip berhenti antarwaktu karena:</p> <ul style="list-style-type: none">a. meninggal dunia;b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai anggota Perangkat Pemira FH Undip; atauc. diberhentikan secara tidak hormat. <p>(2) Anggota Perangkat Pemira FH Undip diberhentikan secara tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Perangkat Pemira FH Undip;b. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;c. terbukti melakukan Pelanggaran etika. <p>(3) Pemberhentian anggota Perangkat Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat keputusan SM FH Undip</p>
--	--	--	--

			<p>(1) Pemberhentian anggota Perangkat Pemira FH Undip didahului dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengaduan secara tertulis yang disampaikan oleh anggota Perangkat Pemira FH Undip, Peserta Pemira FH Undip, tim Kampanye Pemira FH Undip, dan/atau Pemilih; ataub. permohonan secara tertulis yang disampaikan oleh anggota Perangkat Pemira FH Undip. <p>(2) Pengaduan atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada DKPPR FH Undip.</p> <p>(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan alasan pemberhentian anggota Perangkat Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) huruf c</p> <p>(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan alasan pemberhentian anggota Perangkat Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf b.</p> <p>(5) DKPPR FH Undip wajib menindaklanjuti pengaduan atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sidang DKPPR FH Undip.</p>
--	--	--	---

			<p>(6) Hasil sidang DKPPR FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya disampaikan kepada anggota Perangkat Pemira FH Undip, Peserta Pemira FH Undip, tim Kampanye, dan/atau Pemilih yang bersangkutan beserta SM FH Undip.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindak lanjut pengaduan atau permohonan melalui sidang DKPPR FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan DKPPR FH Undip.</p>
	TY FH Undip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara rill, di tahun lalu ketentuan tentang TY FH Undip memang sudah ada. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum juga terealisasi. Sehingga, apa yang diatur dalam Perma FH Undip tentang Pemira yang sekarang berlaku perlu dipertanyakan. 2. Ketentuan pembentukan TY FH Undip dalam Perma Pemira FH Undip masih juga belum jelas. Dalam hal ini 	<p>Diatur ketentuan lebih lanjut, yakni:</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Keanggotaan</p> <p>(1) Anggota TY FH Undip berjumlah 5 (lima) orang dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. satu orang perwakilan dari SM FH Undip; b. satu orang perwakilan dari BEM FH Undip; c. satu orang perwakilan dari UKM FH Undip klaster riset dan keilmuan; d. satu orang perwakilan dari UKM FH Undip klaster minat dan bakat; dan e. satu orang perwakilan dari UKM FH Undip klaster kerohanian dan hubungan publik.

		<p>perlu diatur ketentuan yang lebih terperinci.</p> <p>3. Diperlukan prosedur pembentukan TY yang lebih jelas, yakni dimulai dari tahap pengiriman nama calon hingga penetapan keanggotaan.</p>	<p>(2) Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat merupakan pihak dari luar SM FH Undip, BEM FH Undip, dan klaster UKM FH Undip yang bersangkutan.</p> <p>(3) Ketentuan klasterisasi UKM FH Undip yang sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf c, d, dan e hanya berlaku dan hanya memiliki kekuatan tetap dalam Penyelenggaraan Pemira FH Undip.</p> <p>(4) Untuk menjadi calon anggota TY FH Undip, perwakilan SM FH Undip, BEM FH Undip, dan UKM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP); b. berstatus sebagai Mahasiswa minimal semester 7 (tujuh); c. mempunyai minimal indeks prestasi kumulatif (IPK) paling sedikit 3.00 (tiga koma nol) dibuktikan dengan kartu hasil studi (KHS) semester terakhir; d. pernah mengikuti dan memiliki pengalaman sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun berorganisasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan e. bersedia mengikuti pelatihan tim yudisial yang
--	--	--	---

			<p>diselenggarakan oleh SM FH Undip.</p> <p>(5) Pelatihan tim yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e diselenggarakan dengan ketentuan di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none">a. berisi materi tentang dasar-dasar tata beracara dalam peradilan, unsur-unsur dalam proses beracara, pembuktian sengketa proses dan sengketa hasil pemilihan umum, dan etika dalam proses beracara;b. diisi oleh pembicara yang setidaknya menjabat sebagai dosen fakultas hukum; danc. dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkannya anggota TY FH Undip terpilih. <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pembentukan TY FH Undip</p> <p>(1) Pembentukan keanggotaan TY FH Undip terdiri dari 3 (tiga) tahap di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none">a. tahap perencanaan;b. tahap pembahasan; danc. tahap penetapan; <p>(2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan bersamaan dengan tahap penyusunan dan</p>
--	--	--	--

			<p>pembentukan nama calon anggota Pansel FH Undip oleh BEM FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 31.</p> <p>(3) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diawali dengan pengiriman surat permohonan SM FH Undip kepada BEM FH Undip dan UKM FH Undip agar mengirimkan nama perwakilan sebagai calon anggota TY FH Undip.</p> <p>(4) Dalam kurun waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan, BEM FH Undip dan UKM FH Undip mengirimkan masing-masing 1 (satu) nama perwakilan sebagai calon anggota TY FH Undip kepada SM FH Undip melalui surat elektronik.</p> <p>(5) Dalam hal BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip belum juga mengirimkan 1 (satu) nama perwakilan sebagai calon anggota TY FH Undip dalam kurun waktu 7 (tujuh) Hari sejak pengiriman surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan, SM FH Undip mengirimkan surat peringatan kepada BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip.</p> <p>(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tidak menghilangkan kewajiban SM FH Undip untuk menyiapkan 1 (satu) nama perwakilan sebagai calon anggota</p>
--	--	--	--

			<p>TY FH Undip.</p> <p>(7) Nama perwakilan dari BEM FH Undip, UKM FH Undip, dan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), selanjutnya dihimpun dan diklasifikasikan oleh SM FH Undip.</p> <p>(1) Tahap pembahasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf b berupa tindak lanjut atas nama-nama perwakilan calon anggota TY FH Undip dari UKM FH Undip yang telah dihimpun dan diklasifikasikan oleh SM FH Undip.</p> <p>(2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa forum pembahasan yang dihadiri oleh SM FH Undip dan UKM FH Undip guna menentukan 1 (satu) orang calon anggota TY FH Undip untuk perwakilan tiap klaster UKM FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.</p> <p>(3) Kehadiran UKM FH Undip dalam forum pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan klaster UKM FH Undip masing-masing.</p> <p>(4) Pengambilan keputusan dalam forum pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut kesepakatan antar UKM FH Undip yang bersangkutan.</p> <p>(5) Hasil keputusan dari forum pembahasan berupa nama calon</p>
--	--	--	--

			<p>anggota TY FH Undip yang disetujui selanjutnya dituliskan dalam berita acara dengan ditandatangani oleh ketua atau pihak yang mewakili UKM FH Undip dalam klaster yang sama.</p> <p>(6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikirimkan kepada SM FH Undip.</p> <p>(1) Tahap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c berupa penyampaian nama-nama calon anggota TY FH Undip oleh SM FH Undip kepada Dekanat FH Undip.</p> <p>(2) Nama-nama calon anggota TY FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah nama calon anggota TY FH Undip dari BEM FH Undip dan SM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7) serta nama calon anggota TY FH Undip dari perwakilan klaster UKM FH Undip berdasarkan hasil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5).</p> <p>(3) Nama-nama calon anggota TY FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi anggota TY FH Undip terpilih oleh Dekanat FH Undip melalui surat keputusan.</p> <p>(4) Penetapan anggota TY FH Undip terpilih selambat-lambatnya dilakukan bersamaan dengan penetapan anggota KPPR FH</p>
--	--	--	---

			<p>Undip Inti, BPPR FH Undip Inti, DKPPR FH Undip, dan TPK FH Undip oleh SM FH Undip.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Hak, Wewenang, dan Tugas TY FH Undip</p> <p>TY FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">a. memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Sengketa Proses atau Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip sebagai upaya hukum tingkat terakhir; danb. memberikan laporan hasil putusan Sengketa Hasil kepada KPPR FH Undip. <p>TY FH Undip memiliki tugas sebagai untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">a. menerima, memutus, dan menyelesaikan upaya hukum permohonan Sengketa Proses dan Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip dengan adil dan transparan;b. memberikan laporan hasil putusan Sengketa Proses dan Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip kepada KPPR FH Undip;c. menerima, memutus, dan menyelesaikan permohonan Sengketa Hasil dengan adil dan transparan; dand. memberikan laporan hasil putusan Sengketa Hasil kepada KPPR FH Undip dan Mahasiswa.
--	--	--	---

.	Penyelenggaraan Pemira FH Undip	Diperlukan adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan Pemira FH Undip. Di mana ketika dilihat secara penuh, ketentuan mengenai Penyelenggaraan Pemira FH Undip dalam Perma FH Undip tentang Pemira yang sekarang berlaku masih juga belum dapat memberikan kepastian hukum, misalnya mengenai verifikasi peserta Pemira FH Undip, pendaftaran peserta Pemira FH Undip, kampanye, serta penetapan nomor urut.	<p>Diatur ketentuan lebih lanjut, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemira FH Undip dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam satu tahun. (2) Penyelenggaraan dan penanggung jawab penyelenggaraan Pemira FH Undip adalah KPPR FH Undip. (3) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemira FH Undip ditetapkan dengan keputusan KPPR FH Undip. (4) Penetapan Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemira FH Undip wajib mempertimbangkan lini masa pelaksanaan pemilihan umum raya Universitas Diponegoro.
		Diperlukan adanya pengaturan mengenai tahapan penyelenggaraan Pemira FH Undip.	<p>Diperlukan ketentuan lebih lanjut, yakni:</p> <p>Tahapan penyelenggaraan Pemira FH Undip:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. verifikasi DPT; b. pendaftaran peserta Pemira FH Undip; c. verifikasi syarat calon Peserta Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip; d. penambahan waktu pemenuhan persyaratan calon Peserta Pemira FH Undip; e. pengumuman hasil Verifikasi Syarat dan penetapan

			<p>calon Peserta Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip;</p> <p>f. penetapan nomor urut Peserta Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip;</p> <p>g. masa Kampanye Pemira FH Undip;</p> <p>h. masa Tenang;</p> <p>i. pemungutan suara;</p> <p>j. penghitungan suara secara terbuka; dan</p> <p>k. penetapan Peserta Pemira FH Undip terpilih.</p>
		Diperlukan adanya pengaturan mengenai Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip.	Diperlukan ketentuan lebih lanjut, yakni: “Pengaduan dan penyelesaian Sengketa Proses pemira FH Undip dilaksanakan selama tahapan Penyelenggaraan Pemira FH Undip yang meliputi Verifikasi DPT, pendaftaran Peserta Pemira FH Undip, Verifikasi Syarat calon Peserta Pemira FH Undip, pengumuman hasil Verifikasi Syarat dan penetapan calon Peserta Pemira FH Undip, penetapan nomor urut Peserta Pemira FH Undip, masa Kampanye Pemira FH Undip, Masa Tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga pengumuman hasil penghitungan suara”.
		Diperlukan adanya pengaturan mengenai Verifikasi DPT Pemira FH Undip.	Diperlukan ketentuan lebih lanjut, yakni: (1) KPPR FH Undip wajib mempersiapkan DPT yang telah diverifikasi oleh Dekanat FH Undip selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sebelum pemungutan suara Pemira FH

			<p>Undip dilaksanakan.</p> <p>(2) KPPR FH Undip bertugas melakukan pengecekan dan peninjauan kembali terhadap DPT yang telah diverifikasi oleh Dekanat FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Pengecekan dan peninjauan kembali terhadap DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk melegitimasi Mahasiswa yang tercantum dalam DPT.</p> <p>(4) DPT yang telah melalui proses pengecekan dan peninjauan kembali oleh KPPR FH Undip selanjutnya dipublikasikan kepada Mahasiswa selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemira FH Undip.</p> <p>(5) Dalam hal terdapat Mahasiswa yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar dalam DPT, KPPR FH Undip berhak untuk menerima permohonan pengajuan DPT oleh Mahasiswa yang bersangkutan.</p> <p>(6) Permohonan pengajuan DPT dilakukan oleh Mahasiswa yang bersangkutan dan/atau Mahasiswa lain dengan menunjukkan kartu tanda Mahasiswa atau dokumen sejenis, serta surat pernyataan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan merupakan mahasiswa yang sedang aktif menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</p> <p>(7) Permohonan pengajuan DPT dilakukan paling lambat 2 (dua)</p>
--	--	--	---

			<p>hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemira FH Undip.</p> <p>(8) KPPR FH Undip wajib melakukan perbaikan terhadap DPT dalam hal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).</p> <p>(9) DPT yang telah melalui perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib dipublikasikan kepada Mahasiswa dan digunakan KPPR FH Undip dalam melaksanakan pemungutan suara.</p> <p>(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan DPT diatur dalam petunjuk teknis Pemira FH Undip yang ditetapkan oleh KPPR FH Undip.</p>
		Diperlukan adanya pengaturan mengenai Masa Pendaftaran Peserta Pemira FH Undip.	<p>Diperlukan ketentuan lebih lanjut, yakni:</p> <p>(1) Masa pendaftaran bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip serta bakal Calon Senator SM FH Undip ditetapkan oleh KPPR FH Undip.</p> <p>(2) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan kepada Mahasiswa.</p>
		Diperlukan adanya pengaturan mengenai Syarat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil	<p>Diperlukan ketentuan lebih lanjut, yakni:</p> <p>Bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p>

		<p>Ketua BEM FH Undip dalam pelaksanaan Pemira FH Undip.</p>	<ul style="list-style-type: none">a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP);b. sehat jasmani yang dibuktikan dengan akta otentik berupa surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba;c. tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan kekerasan seksual yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis;d. berstatus sebagai Mahasiswa yang telah menempuh studi setidaknya 4 (empat) semester yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa (KTM) yang dikeluarkan oleh Dekanat FH Undip;e. bersedia melepaskan semua jabatan struktural di Ormawa FH Undip dan organisasi kemahasiswaan tingkat universitas jika terpilih;f. memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling sedikit 3.00 (tiga koma nol nol) yang dibuktikan dengan kartu hasil studi (KHS) semester terakhir;g. mendapatkan dukungan paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) Mahasiswa yang dibuktikan dengan foto dan/atau fotocopy kartu tanda mahasiswa (KTM) disertai tanda tangan yang bersangkutan dan tidak boleh terdapat kesamaan pendukung dengan pasangan calon lain;h. belum pernah mencalonkan diri sebagai ketua/wakil ketua
--	--	--	--

			<p>BEM FH Undip atau ketua/wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro;</p> <p>i. tidak terdaftar sebagai ketua/wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, Calon Senator SM FH Undip, calon senator Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro, calon Ketua UKM FH Undip, atau calon Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Diponegoro;</p> <p>j. pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip yang sedang tergabung dalam Ormawa FH Undip wajib menjalani cuti dari keanggotaannya selama Penyelenggaraan Pemira FH Undip yakni dimulai sejak pendaftaran Peserta Pemira FH Undip hingga penetapan Peserta Pemira FH Undip terpilih;</p> <p>k. telah mengikuti training legislatif tingkat fakultas dan/atau training legislatif tingkat universitas yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti dari pelaksana yang bersangkutan; dan</p> <p>l. telah mengikuti latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar di lingkup Universitas Diponegoro yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pelaksana yang bersangkutan.</p>
		<p>Diperlukan adanya pengaturan mengenai Pihak Pendaftaran Bakal</p>	<p>Diperlukan ketentuan lebih lanjut, yakni:</p> <p>(1) Pendaftaran bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua</p>

		<p>Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dalam pelaksanaan Pemira FH Undip.</p>	<p>BEM FH Undip dilakukan oleh bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip yang bersangkutan.</p> <p>(2) Selain dilakukan oleh bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip yang bersangkutan, pendaftaran bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dapat dilakukan oleh pihak lain.</p> <p>(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pendaftaran wajib menyampaikan surat kuasa yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip yang bersangkutan kepada KPPR FH Undip.</p> <p>Pendaftaran bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip kepada KPPR FH Undip wajib menyertakan setidaknya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pasfoto bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip; b. naskah visi dan misi; dan c. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47.
		<p>Diperlukan adanya pengaturan mengenai Kekosongan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dalam</p>	<p>Diperlukan ketentuan lebih lanjut, yakni:</p> <p>(1) Dalam hal belum terdapat satupun bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip hingga berakhirnya waktu masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal</p>

		<p>pelaksanaan Pemira FH Undip</p>	<p>46 ayat (1), KPPR FH Undip wajib memberikan perpanjangan waktu masa pendaftaran.</p> <p>(2) Dalam hal perpanjangan waktu masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan masih belum terdapat satupun bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, pemilihan Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dilakukan melalui mekanisme alternatif sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.</p>
		<p>Diperlukan adanya pengaturan mengenai Pendaftaran Bakal Calon Senator SM FH Undip, Jumlah Kursi, dan Masa Pendaftaran Bakal Calon Senator SM FH Undip dalam pelaksanaan Pemira FH Undip.</p>	<p>Diperlukan ketentuan lebih lanjut, yakni:</p> <p>(1) Bakal Calon Senator SM FH Undip terbagi menjadi 3 (tiga), di antaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bakal Calon Senator SM FH Undip independen; b. bakal Calon Senator SM FH Undip perwakilan UKM FH Undip; atau c. bakal Calon Senator SM FH Undip perwakilan luar kampus utama. <p>(2) Jumlah kursi untuk bakal Calon Senator SM FH Undip independen yang berstatus sebagai Mahasiswa semester 1 (satu) hingga semester 2 (dua) berjumlah maksimal 4 (empat) orang.</p> <p>(3) Jumlah kursi untuk bakal Calon Senator SM FH Undip independen yang berstatus sebagai Mahasiswa semester 3</p>

			<p>(tiga) hingga semester 4 (empat) berjumlah maksimal 4 (empat) orang.</p> <p>(4) Jumlah kursi untuk bakal Calon Senator SM FH Undip independen yang berstatus sebagai Mahasiswa semester 5 (lima) hingga semester 6 (enam) berjumlah maksimal 4 (empat) orang.</p> <p>(5) Jumlah kursi untuk bakal Calon Senator SM FH Undip perwakilan UKM FH Undip berjumlah masing-masing 1 (satu) orang untuk tiap UKM FH Undip.</p> <p>(6) Jumlah kursi untuk bakal Calon Senator SM FH Undip perwakilan luar kampus utama berjumlah maksimal 2 (dua) orang;</p> <p>(7) Jumlah kursi bakal Calon Senator SM FH Undip yang wajib dipenuhi dalam tahap pendaftaran bakal Calon Senator SM FH Undip berjumlah 19 (sembilan belas).</p> <p>(8) Dalam hal belum terpenuhinya jumlah kursi bakal Calon Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hingga berakhirnya waktu masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1), KPPR FH Undip wajib memberikan perpanjangan waktu masa pendaftaran.</p> <p>(9) Dalam hal perpanjangan waktu masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah berakhir dan jumlah kursi bakal</p>
--	--	--	---

			<p>Calon Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum terpenuhi, pemilihan bakal Calon Senator SM FH Undip dilakukan melalui mekanisme alternatif sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.</p>
		<p>Diperlukan adanya pengaturan mengenai Syarat Pendaftaran Bakal Calon Senator SM FH Undip dalam pelaksanaan Pemira FH Undip.</p>	<p>Diperlukan ketentuan lebih lanjut, yakni:</p> <p>(1) Bakal Calon Senator SM FH Undip independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP);b. sehat jasmani yang dibuktikan dengan akta otentik berupa surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba;c. tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan kekerasan seksual yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis;d. berstatus sebagai Mahasiswa minimal semester 1 (satu) dan maksimal semester 5 (lima) yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa (KTM), surat keterangan aktif kuliah yang dikeluarkan oleh Dekanat FH Undip dan kartu hasil studi (KHS) semester terakhir;

			<ul style="list-style-type: none">e. memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling sedikit 3.00 (tiga koma nol) kecuali bagi Mahasiswa semester 1 (satu);f. mendapatkan dukungan minimal 50 (lima puluh) Mahasiswa dengan paling tidak 25 (dua puluh lima) diantaranya berasal dari Mahasiswa angkatannya yang dibuktikan dengan foto dan/atau fotokopi kartu tanda mahasiswa (KTM) disertai tanda tangan dan tidak boleh ada yang sama dengan calon lain;g. telah mengikuti training legislatif tingkat fakultas dan latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat pra-dasar yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari pelaksana yang bersangkutan; danh. wajib menjalani cuti dari keanggotaan Ormawa FH Undip selama Penyelenggaraan Pemira FH Undip. <p>(2) Bakal Calon Senator SM FH Undip perwakilan UKM FH Undip wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP);b. sehat jasmani yang dibuktikan dengan akta otentik berupa surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba;
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none">c. tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan kekerasan seksual yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis;d. berstatus sebagai Mahasiswa minimal semester 1 (satu) dan maksimal semester 5 (lima) yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa (KTM), surat keterangan aktif kuliah yang dikeluarkan oleh Dekanat FH Undip dan kartu hasil studi (KHS) semester terakhir;e. memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling sedikit 3.00 (tiga koma nol) kecuali bagi Mahasiswa semester 1 (satu);f. menyertakan surat pendelegasian UKM FH Undip dengan tetap harus mengikuti orasi terbuka;g. telah mengikuti training legislatif tingkat fakultas dan latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat pra-dasar yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari pelaksana yang bersangkutan; danh. wajib menjalani cuti dari keanggotaan Ormawa FH Undip selain UKM FH Undip sebagaimana dimaksud pada poin f selama Penyelenggaraan Pemira FH Undip. <p>(3) Bakal Calon Senator SM FH Undip perwakilan luar kampus</p>
--	--	--	--

			<p>utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP);b. sehat jasmani yang dibuktikan dengan akta otentik berupa surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba;c. tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan kekerasan seksual yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis;d. berstatus sebagai Mahasiswa minimal semester 1 (satu) dan maksimal semester 3 (tiga) yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa (KTM), surat keterangan aktif kuliah yang dikeluarkan oleh Dekanat FH Undip dan kartu hasil studi (KHS) semester terakhir;e. memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling sedikit 3.00 (tiga koma nol) kecuali bagi Mahasiswa semester 1 (satu);f. menyertakan hasil musyawarah Mahasiswa setiap unit-unit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di luar kampus utama yang menyatakan bahwa ada
--	--	--	--

			<p>maksimal 2 (dua) bakal Calon Senator SM FH Undip yang ditandatangani oleh minimal 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) Mahasiswa semester 1 (satu) dan semester 3 (tiga) di luar dari kampus utama;</p> <p>g. telah mengikuti training legislatif tingkat fakultas dan latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat pra-dasar yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari pelaksana yang bersangkutan; dan</p> <p>h. wajib menjalani cuti dari keanggotaan Ormawa FH Undip selama masa Pemira FH Undip.</p> <p>(4) Bakal Calon Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) seluruhnya wajib mengikuti orasi terbuka.</p> <p>(5) Waktu dan mekanisme penyelenggaraan orasi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh KPPR FH Undip.</p> <p>(6) Dalam hal bakal Calon Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) tidak mengikuti orasi terbuka tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, KPPR FH Undip berhak membatalkan penerimaan bakal Calon Senator SM FH Undip yang bersangkutan.</p>
		Diperlukan adanya pengaturan	Diperlukan ketentuan lebih lanjut, yakni:

		<p>mengenai Pihak Pendaftaran Bakal Calon Senator SM FH Undip dalam pelaksanaan Pemira FH Undip, dan ketentuan mengenai pendelegasian wewenang apabila yang bersangkutan tidak bisa.</p>	<p>(1) Pendaftaran bakal Calon Senator SM FH Undip dilakukan oleh bakal Calon Senator SM FH Undip yang bersangkutan.</p> <p>(2) Selain dilakukan oleh bakal Calon Senator SM FH Undip yang bersangkutan, pendaftaran bakal Calon Senator SM FH Undip dapat dilakukan oleh pihak lain.</p> <p>(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pendaftaran wajib menyampaikan surat kuasa yang ditandatangani oleh bakal Calon Senator SM FH Undip yang bersangkutan kepada KPPR FH Undip.</p> <p>(4) Pendaftaran bakal Calon Senator SM FH Undip kepada KPPR FH Undip wajib menyertakan setidaknya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pasfoto bakal calon Senator FH Undip; b. naskah visi dan misi; dan c. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51.
		<p>Diperlukan adanya pengaturan mengenai Verifikasi Syarat Peserta Pemira FH Undip. Hal ini perlu diatur tersendiri karena supaya bisa memperjelas bagaimana tahapan yang ada di Fakultas Hukum Undip.</p>	<p>Diperlukan ketentuan lebih lanjut, yakni:</p> <p>(1) Verifikasi Syarat calon Peserta Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip terbagi atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. verifikasi berkas persyaratan calon Peserta Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip secara internal yang disaksikan oleh BPPR FH Undip sebagai Perangkat Pemira FH Undip yang mengawasi jalannya

			<p>Penyelenggaraan Pemira FH Undip; dan</p> <p>b. verifikasi berkas persyaratan calon Peserta Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip dengan mengundang seluruh Mahasiswa.</p> <p>(2) Verifikasi Syarat calon Peserta Pemira FH Undip dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah masa pendaftaran Peserta Pemira FH Undip ditutup.</p> <p>(3) Hasil Verifikasi Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dalam surat keputusan KPPR FH Undip.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Verifikasi Syarat akan diatur dalam petunjuk teknis Pemira FH Undip yang ditetapkan oleh KPPR FH Undip.</p>
		<p>Diperlukan adanya pengaturan mengenai Penambahan Waktu Pemenuhan Persyaratan Pemira FH Undip. Di sini berfungsi untuk memberikan hak dan batasan yang jelas bagi calon Peserta Pemira FH Undip yang berkas dan persyaratannya belum terpenuhi.</p>	<p>Diperlukan ketentuan lebih lanjut, yakni:</p> <p>(1) Dalam hal Verifikasi Syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) menyatakan adanya calon Peserta Pemira FH Undip yang belum memenuhi persyaratan, KPPR FH Undip memberikan kesempatan kepada calon Peserta Pemira FH Undip yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan yang belum lengkap dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dikeluarkan.</p>

			<p>(2) Lama durasi penambahan waktu untuk pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan berat ringannya berkas persyaratan yang perlu dipenuhi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut tentang penambahan waktu pemenuhan persyaratan calon Peserta Pemira FH Undip diatur dalam petunjuk teknis Pemira FH Undip yang ditetapkan oleh KPPR FH Undip.</p>
		<p>Diperlukan adanya pengaturan mengenai Pengumuman Hasil Verifikasi Syarat dan Penetapan Calon Peserta Pemira FH Undip.</p>	<p>Diperlukan ketentuan lebih lanjut, yakni:</p> <p>(1) Dalam hal terdapat penambahan waktu untuk pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pengumuman hasil Verifikasi Syarat dan penetapan calon Peserta Pemira FH Undip dilakukan setelah durasi penambahan waktu berakhir.</p> <p>(2) Dalam hal tidak terdapat penambahan waktu untuk pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pengumuman hasil Verifikasi Syarat dan penetapan calon Peserta Pemira FH Undip dilakukan setelah surat keputusan KPPR FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (3) dikeluarkan.</p> <p>(3) Penetapan calon Peserta Pemira FH Undip menjadi Peserta Pemira FH Undip dilakukan melalui surat keputusan KPPR FH</p>

			<p>Undip.</p> <p>(4) Surat keputusan KPPR FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipublikasikan kepada Mahasiswa.</p>
		<p>Diperlukan adanya pengaturan mengenai Penetapan Nomor Urut Peserta Pemira FH Undip.</p>	<p>Diperlukan ketentuan lebih lanjut, yakni:</p> <p>(1) KPPR FH Undip wajib untuk melakukan penetapan nomor urut Peserta Pemira FH Undip secara terbuka.</p> <p>(2) Penetapan nomor urut terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan nomor urut orasi terbuka Pemira FH Undip; dan b. penetapan nomor urut pemilihan. <p>(3) Penetapan nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa nomor urut Peserta Pemira FH Undip dalam melakukan orasi terbuka Pemira FH Undip.</p> <p>(4) Penetapan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa nomor urut Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip serta Calon Senator SM FH Undip independen dalam hal kebutuhan Kampanye Pemira FH Undip dan pemungutan suara.</p> <p>(5) Mekanisme penetapan nomor urut Peserta Pemira FH Undip dapat dilakukan melalui mekanisme:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengambilan nomor urut secara langsung oleh Peserta Pemira FH Undip tanpa diwakilkan; atau

			<p>b. pengambilan nomor urut secara langsung dengan diwakilkan oleh pihak lain yang mendapat surat kuasa dari Peserta Pemira FH Undip terkait.</p> <p>(6) Peserta Pemira FH Undip wajib mengikuti tahap penetapan nomor urut Peserta Pemira FH Undip.</p>
		Diperlukan adanya pengaturan mengenai Masa Kampanye Pemira FH Undip.	<p>Diperlukan ketentuan lebih lanjut, yakni:</p> <p>(1) Kampanye Pemira FH Undip dilaksanakan secara penuh tanggung jawab.</p> <p>(2) Kampanye Pemira FH Undip dilakukan secara serentak menurut waktu yang ditetapkan oleh KPPR FH Undip.</p> <p>(3) KPPR FH Undip wajib untuk menginformasikan waktu Kampanye Pemira FH Undip yang telah ditetapkan kepada publik melalui media elektronik KPPR FH Undip.</p> <p>(4) Dalam masa Kampanye Pemira FH Undip, seluruh Mahasiswa berhak untuk hadir.</p>
		Diperlukan adanya pengaturan mengenai Tim Kampanye Pemira FH Undip.	<p>Diperlukan ketentuan lebih lanjut, yakni:</p> <p>(1) Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dan Calon Senator SM FH Undip independen wajib untuk membentuk dan melaporkan tim Kampanye Pemira FH Undip yang berfungsi untuk membantu proses Kampanye Pemira FH Undip.</p>

			<p>(2) Tim Kampanye Pemira FH Undip berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) orang Mahasiswa.</p> <p>(3) Tim Kampanye Pemira FH Undip tidak boleh terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketua, wakil ketua, dan dewan pimpinan BEM FH Undip; b. ketua, wakil ketua, sekretaris jenderal SM FH Undip; c. ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara UKM FH Undip; dan d. anggota Perangkat Pemira FH Undip; <p>(4) Peserta Pemira FH Undip dan Tim Kampanye terkait dalam melaksanakan kegiatan Kampanye Pemira FH Undip dilarang mengikutsertakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketua, wakil ketua, dan dewan pimpinan BEM FH Undip; b. ketua, wakil ketua, sekretaris jenderal SM FH Undip; c. ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara UKM FH Undip; dan d. anggota Perangkat Pemira FH Undip
		<p>Diperlukan adanya pengaturan mengenai Dana Kampanye Pemira FH Undip.</p>	<p>Diperlukan ketentuan lebih lanjut, yakni:</p> <p>(1) Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dan Calon Senator SM FH Undip independen wajib melaporkan sumber dana dan penggunaan dana Kampanye Pemira FH</p>

			<p>Undip secara rinci dan disertai bukti kepada KPPR FH yang kemudian diserahkan kepada TPK FH Undip.</p> <p>(2) Sumber dana dan penggunaan dana Kampanye Pemira FH Undip tidak boleh bernilai 0 (nol) rupiah.</p> <p>(3) Pendanaan Kampanye Pemira FH Undip dari masing-masing peserta diperbolehkan dari sumber-sumber yang halal dan dapat dipertanggungjawabkan</p> <p>(4) Dana Kampanye Pemira FH Undip sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, dan/jasa.</p> <p>(5) Dana kampanye berupa sumbangan dari perseorangan maupun kelompok atau lembaga dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.</p> <p>(6) Sumbangan yang sah berasal dari pihak lain berupa sumbangan yang sah dan bersifat tidak mengikat.</p> <p>(7) Dalam Kampanye Pemira FH Undip, tidak diperbolehkan menggunakan sumber di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none">a. partai politik;b. perusahaan minuman keras;c. perusahaan rokok;d. perusahaan senjata;e. instansi pemerintahan;f. pihak asing; dan/atau
--	--	--	---

			<p>g. perusahaan lain yang serupa.</p> <p>(8) Dalam hal telah diserahkannya laporan sumber dana dan penggunaan dana Kampanye Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPK FH Undip wajib memberikan surat rekomendasi kepada KPPR FH Undip untuk menerima atau menolak laporan yang dimaksud.</p>
		<p>Diperlukan adanya pengaturan mengenai Bentuk Kampanye Pemira FH Undip.</p>	<p>Diperlukan ketentuan lebih lanjut, yakni:</p> <p>(1) Kampanye Pemira FH Undip dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pertemuan umum; b. pertemuan terbatas; c. pertemuan tatap muka; d. penyebaran bahan Kampanye Pemira FH Undip kepada Mahasiswa; e. pemasangan bahan peraga di lingkungan FH Undip; f. media sosial; g. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet; h. debat Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM tentang materi Kampanye Pemira FH Undip yang akan ditentukan oleh KPPR FH Undip; dan/atau i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemira FH Undip.

			<p>(2) Materi Kampanye Pemira FH Undip meliputi visi, misi, dan program yang disampaikan oleh Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dan Calon Senator SM FH Undip independen.</p> <p>(3) Kampanye Pemira FH Undip dalam bentuk pertemuan umum, pertemuan terbatas, dan pertemuan tatap muka diawasi oleh BPPR FH Undip.</p> <p>(4) Dalam hal Kampanye Pemira FH Undip dilakukan dalam bentuk pemasangan bahan peraga di lingkungan FH Undip, maka tim Kampanye Pemira FH Undip terkait perlu untuk mencantumkan nomor urut pemilihan dalam bahan peraga dan dilaporkan kepada KPPR FH Undip.</p> <p>(5) KPPR FH Undip menentukan tempat-tempat di FH Undip yang dapat dimanfaatkan oleh Peserta Pemira FH Undip untuk pemasangan bahan peraga.</p>
		<p>Diperlukan adanya pengaturan mengenai Larangan Kampanye Pemira FH Undip.</p>	<p>Diperlukan ketentuan lebih lanjut, yakni:</p> <p>(1) Melakukan Kampanye Pemira FH Undip dengan menghina seorang, agama, suku, ras, golongan, dan ideologi.</p> <p>(2) Menghasut dan memprovokasi Peserta Pemira FH Undip.</p> <p>(3) Mengganggu ketertiban umum dan merugikan sesama Peserta Pemira FH Undip.</p> <p>(4) Melakukan Kampanye Pemira FH Undip dalam kegiatan atau</p>

			<p>program kerja Ormawa FH Undip tanpa seizin panitia penyelenggara.</p> <p>(5) Mengancam dan/atau menyuruh melakukan penggunaan kekerasan pada Mahasiswa, Peserta Pemira FH Undip dan anggota Perangkat Pemira FH Undip.</p> <p>(6) Memasang bahan peraga Kampanye Pemira FH Undip tidak pada tempat yang telah ditentukan oleh KPPR FH Undip.</p>
		Diperlukan adanya pengaturan mengenai Masa Tenang Pemira FH Undip.	<p>Diperlukan ketentuan lebih lanjut, yakni:</p> <p>(1) Masa Tenang dimulai paling lama 3 (tiga) Hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.</p> <p>(2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Pemira FH Undip, tim Kampanye Pemira FH Undip, anggota Perangkat Pemira FH Undip, dan Ormawa FH Undip dilarang menjanjikan atau memberikan suatu hal kepada Pemilih untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak menggunakan hak pilihnya; dan/atau b. memilih Peserta Pemira FH Undip tertentu.
		Diperlukan adanya pengaturan mengenai Pemungutan Suara Pemira FH Undip.	<p>Diperlukan ketentuan lebih lanjut, yakni:</p> <p>(1) Pemungutan suara pada Pemira FH Undip dilakukan serentak secara daring dan/atau luring di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau media pemungutan suara</p>

			<p>tertentu.</p> <p>(2) Jika tahapan pemungutan suara dilaksanakan secara luring, Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda mahasiswa (KTM) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau tanda bukti lain yang menunjukkan dirinya sebagai Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya dalam tahapan pemungutan suara.</p> <p>(3) Jika tahapan pemungutan suara dilaksanakan secara daring, Pemilih wajib mengikuti syarat dan ketentuan serta alur penggunaan hak pilih yang ditentukan oleh KPPR FH Undip.</p> <p>(4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memilih Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip serta Calon Senator SM FH Undip independen.</p> <p>(5) Dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, maka akan dilakukan pemungutan suara dengan melawan kotak kosong.</p>
		<p>Diperlukan adanya pengaturan mengenai Waktu dan Jumlah Suara Pemungutan Suara Pemira FH Undip.</p>	<p>Diperlukan ketentuan lebih lanjut, yakni:</p> <p>(1) Waktu dan tempat pemungutan suara Pemira FH Undip ditentukan oleh KPPR FH Undip.</p> <p>(2) Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemira FH Undip, KPPR FH Undip bertugas untuk membuat surat suara.</p>

			<p>(3) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh KPPR FH Undip dengan mempertimbangkan jumlah DPT yang telah diverifikasi.</p> <p>(4) Dalam hal terjadi kekurangan surat suara dalam tahap pemungutan suara, dilakukan penambahan surat suara melalui berita acara yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua KPPR FH Undip, Ketua BPPR FH Undip, Ketua DKPPR FH Undip, pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, Calon Senator SM FH Undip, ketua TY FH Undip, serta Dekanat FH Undip.</p> <p>(5) Penetapan jumlah surat suara dan syarat sahnya surat ditentukan oleh KPPR FH Undip.</p>
		<p>Diperlukan adanya pengaturan mengenai Penghitungan Suara Secara Terbuka Pemira FH Undip.</p>	<p>Diperlukan ketentuan lebih lanjut, yakni:</p> <p>(1) Penghitungan suara dilakukan oleh KPPR FH Undip secara daring dan/atau luring dengan dapat disaksikan oleh publik secara luas selambat lambatnya 1 (satu) Hari setelah pemungutan suara berakhir.</p> <p>(2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh seluruh Peserta Pemira FH Undip, perwakilan anggota KPPR FH Undip, perwakilan anggota BPPR FH Undip, perwakilan DKPPR FH Undip, perwakilan anggota TPK FH Undip, dan perwakilan anggota TY FH Undip.</p>

			<p>(3) Dalam hal Peserta Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan untuk hadir dalam penghitungan suara, Peserta Pemira FH Undip yang bersangkutan wajib mengutus seorang Mahasiswa untuk menjadi saksi.</p> <p>(4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membawa surat kuasa yang ditandatangani oleh Peserta Pemira FH Undip terkait.</p> <p>(5) Mahasiswa berhak hadir dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(6) Setelah penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilaksanakan, KPPR FH Undip wajib sesegera mungkin membuat berita acara yang ditandatangani oleh KPPR FH Undip dan para saksi yang ditentukan oleh KPPR FH Undip.</p>
		<p>Diperlukan adanya pengaturan mengenai Penetapan Peserta Pemira FH Undip Terpilih.</p>	<p>Diperlukan ketentuan lebih lanjut, yakni:</p> <p>(1) Hasil Pemira FH Undip dapat dianggap sah apabila jumlah Pemilih yang menggunakan hak suaranya tidak kurang dari 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah total DPT.</p> <p>(2) Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) dari total suara sah pada Pemira FH Undip.</p> <p>(3) Dalam hal ketentuan pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka</p>

			<p>dilakukan Pemira FH Undip ulang hanya untuk pemungutan suara Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip.</p> <p>(4) Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka dilakukan Pemira FH Undip putaran kedua dengan pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat diberlakukan apabila terdapat lebih dari 2 (dua) Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip.</p> <p>(6) Apabila terdapat Calon Senator SM FH Undip independen memperoleh jumlah suara yang sama, maka calon yang memperoleh suara terbanyak dari angkatannya ditetapkan sebagai calon Senator SM FH Undip terpilih.</p> <p>(7) Penetapan hasil Pemira FH Undip dilakukan oleh KPPR FH Undip dalam waktu selambat lambatnya 2 (dua) Hari terhitung dari dilakukannya penghitungan suara.</p> <p>(8) Penetapan hasil Pemira FH Undip yang dilakukan oleh KPPR FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dikatakan sah apabila jumlah Pemilih sama dengan jumlah suara masuk.</p> <p>(9) Ketetapan KPPR FH Undip tentang hasil Pemira FH Undip harus diberitahukan secara luas kepada publik.</p>
--	--	--	--

	<p>Pelanggaran Pemira FH Undip</p>	<p>Diperlukan adanya pengaturan mengenai Pelanggaran lebih komprehensif mengenai pengaturan umum, jenis dan sanksi, serta penyelesaiannya.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VIII PELANGGARAN Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Pelanggaran berasal dari temuan Pelanggaran dan/atau laporan Pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemira FH Undip.</p> <p>(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip; dan b. Pelanggaran etika. <p>(3) Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Pemira FH Undip.</p> <p>(4) Pelanggaran etika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pelanggaran yang dilakukan anggota KPPR FH Undip, BPPR FH Undip, TPK FH Undip dan/atau DKPPR FH Undip terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan ini dan/atau kode etik yang ditetapkan oleh DKPPR FH Undip.</p>
--	------------------------------------	--	--

			<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip Paragraf 1 Jenis dan Sanksi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pelanggaran ringan;b. Pelanggaran sedang; danc. Pelanggaran berat. <p>(2) Yang termasuk jenis-jenis pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Peserta Pemira FH Undip dan/atau tim Kampanye Pemira FH Undip yang bersangkutan melakukan Kampanye Pemira FH Undip secara lisan dan/atau tertulis di luar waktu yang telah ditentukan oleh KPPR FH Undip;b. Peserta Pemira FH Undip dan/atau tim Kampanye Pemira FH Undip yang bersangkutan melakukan Kampanye Pemira FH Undip dengan mengikutsertakan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat
--	--	--	---

			<p>(4);</p> <ul style="list-style-type: none">c. Peserta Pemira FH Undip dan/atau tim Kampanye Pemira FH Undip yang bersangkutan memasang bahan peraga Kampanye Pemira FH Undip di luar tempat yang telah ditentukan oleh KPPR FH Undip;d. Peserta Pemira FH Undip dan/atau tim Kampanye Pemira FH Undip yang bersangkutan menghasut dan memprovokasi Peserta Pemira FH Undip dengan menghina suku, agama, ras, golongan, dan ideologi; dane. Peserta Pemira FH Undip dan/atau tim Kampanye Pemira FH Undip yang bersangkutan melakukan Kampanye Pemira FH Undip dalam kegiatan atau program kerja Ormawa FH Undip tanpa seizin panitia penyelenggara. <p>(3) Sanksi yang dijatuhkan pada ayat (2) adalah pemotongan suara oleh KPPR FH Undip sebanyak 10% (sepuluh persen) suara yang bersangkutan dari total perolehan suara Pemira FH Undip.</p> <p>(4) Yang termasuk jenis-jenis pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Peserta Pemira FH Undip dan/atau tim Kampanye
--	--	--	---

			<p>Pemira FH Undip yang bersangkutan melakukan pemaksaan kepada Pemilih untuk memilih salah satu Peserta Pemira FH Undip yang dibuktikan dengan adanya temuan BPPR FH Undip dan bukti-bukti pendukung; dan/atau</p> <p>b. Peserta Pemira FH Undip dan/atau tim Kampanye Pemira FH Undip yang bersangkutan melakukan sabotase dan/atau intimidasi terhadap pelaksanaan Pemira FH Undip, Pemilih, dan Peserta Pemira FH Undip yang dibuktikan dengan adanya temuan BPPR FH Undip dan bukti-bukti pendukung.</p> <p>(5) Sanksi yang dijatuhkan pada ayat (4) adalah pemotongan suara oleh KPPR FH Undip sebanyak 50% (lima puluh persen) suara yang bersangkutan dari total perolehan suara Pemira FH Undip.</p> <p>(6) Yang termasuk jenis-jenis pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. Peserta Pemira FH Undip dan/atau tim Kampanye Pemira FH Undip yang bersangkutan melakukan penyuapan kepada KPPR FH Undip, BPPR FH Undip, DKPPR FH Undip, TPK FH Undip, TY FH Undip maupun Pemilih yang dibuktikan dengan temuan BPPR FH</p>
--	--	--	---

			<p>Undip dan bukti-bukti pendukung;</p> <p>b. Peserta Pemira FH Undip dan/atau tim Kampanye Pemira FH Undip yang bersangkutan melakukan tindak kekerasan dan/atau pengancaman terhadap KPPR FH Undip, BPPR FH Undip, DKPPR FH Undip, TPK FH Undip, TY FH Undip, Pemilih, dan Peserta Pemira FH Undip yang dibuktikan dengan temuan BPPR FH Undip dan bukti-bukti pendukung; dan/atau</p> <p>c. Peserta Pemira FH Undip dan/atau tim Kampanye Pemira FH Undip yang bersangkutan melakukan kecurangan-kecurangan dan manipulasi hasil Pemira FH Undip yang dibuktikan dengan temuan BPPR FH Undip dan bukti-bukti pendukung.</p> <p>(7) Sanksi yang dijatuhkan pada ayat (6) adalah pemotongan suara total oleh KPPR dari suara yang diperoleh Peserta Pemira FH Undip yang bersangkutan atau sanksi administratif berupa pembatalan Peserta Pemira FH Undip.</p> <p>Paragraf 2 Penyelesaian</p> <p>Pasal 69</p>
--	--	--	--

			<p>(1) BPPR FH Undip menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran Peserta Pemira FH Undip.</p> <p>(2) BPPR FH Undip berhak untuk mengawasi serta menindaklanjuti pelanggaran ini berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. hasil temuan pelanggaran; dan/ataub. laporan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemira FH Undip. <p>(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai temuan Pelanggaran paling lama 2 (dua) hari sejak ditemukannya dugaan Pelanggaran.</p> <p>(4) Laporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan laporan langsung dari Mahasiswa yang mempunyai hak pilih dan/atau Peserta Pemira FH Undip kepada BPPR FH Undip dalam Penyelenggaraan Pemira FH Undip.</p> <p>(5) Laporan Pelanggaran Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">a. nama dan alamat pelapor;b. pihak terlapor;c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
--	--	--	---

			<p>d. uraian kejadian.</p> <p>(6) Laporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPPR FH Undip paling lama 3 (tiga) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemira FH Undip.</p> <p>(7) Temuan dan laporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh BPPR FH Undip paling lama 4 (empat) hari setelah temuan dan laporan Pelanggaran diterima.</p> <p>(8) Pemeriksaan dan pengkajian oleh BPPR FH Undip harus dilakukan secara terbuka.</p> <p>(9) Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemira FH Undip, BPPR FH Undip dapat melakukan investigasi.</p> <p>(10) BPPR FH Undip wajib memutus penyelesaian pelanggaran Peserta Pemira FH Undip paling lama 5 (lima) Hari setelah temuan dan laporan diterima.</p> <p>(11) KPPR FH Undip wajib menindaklanjuti putusan BPPR FH Undip dengan menerbitkan keputusan KPPR FH Undip dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan BPPR FH Undip.</p>
--	--	--	--

			<p>(12) Peserta Pemira yang dikenai sanksi yang diatur dalam Pasal 68 ayat (7) dapat mengajukan upaya hukum ke TY FH Undip dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan KPPR FH Undip ditetapkan.</p> <p>(13) TY FH Undip memutus upaya hukum pelanggaran Peserta Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak berkas perkara diterima oleh TY FH Undip.</p> <p>(14) Putusan TY FH Undip bersifat final dan mengikat.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pelanggaran Etika Paragraf 1 Jenis dan Sanksi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Pelanggaran etika sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (2) huruf b dapat berupa:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. tidak turut serta melakukan tugas sebagaimana ketentuan dalam peraturan ini;</p>
--	--	--	--

			<p>b. melakukan kesalahan administratif yang menyebabkan kerugian bagi Peserta Pemira FH Undip; dan</p> <p>c. melanggar ketentuan dalam kode etik yang ditetapkan oleh DKPPR FH Undip.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat anggota Perangkat Pemira FH Undip yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DKPPR FH Undip wajib memberikan sanksi berupa peringatan, denda, atau pemberhentian anggota Perangkat Pemira FH Undip yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 2 Penyelesaian</p> <p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Pelanggaran etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diselesaikan oleh DKPPR FH Undip.</p> <p>(2) Pengaduan tentang adanya pelanggaran etika diajukan secara tertulis oleh anggota Perangkat Pemira FH Undip, Peserta Pemira FH Undip, Tim Kampanye, dan/atau Pemilih kepada DKPPR FH Undip dengan paling sedikit memuat:</p> <p>a. identitas dan alamat pengadu;</p>
--	--	--	---

			<p>b. identitas anggota Perangkat Pemira FH Undip yang diduga melakukan Pelanggaran etika; dan</p> <p>c. uraian aduan.</p> <p>(3) DKPPR FH Undip wajib melakukan verifikasi dan penelitian terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Ketua DKPPR FH Undip menunjuk 3 (tiga) orang anggota DKPPR FH Undip untuk menjadi majelis atau tim pemeriksa dalam penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(5) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sidang DKPPR FH Undip.</p> <p>(6) DKPPR FH Undip menyampaikan panggilan pertama kepada anggota Perangkat Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lambat 2 (dua) Hari sebelum melaksanakan sidang DKPPR FH Undip.</p> <p>(7) Dalam hal anggota Perangkat Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), DKPPR FH Undip menyampaikan panggilan kedua paling lambat 2 (dua) Hari sebelum melaksanakan sidang DKPPR FH Undip.</p> <p>(8) Anggota Perangkat Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib datang sendiri dan tidak dapat</p>
--	--	--	--

			<p>menguasakan kepada pihak lain.</p> <p>(9) Dalam hal anggota DKPPR FH Undip telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan anggota Perangkat Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPPR FH Undip dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran anggota Perangkat Pemira FH Undip yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Pengadu dan anggota Perangkat Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) dapat menghadirkan saksi dan/atau pihak lain dalam sidang DKPPR FH Undip.</p> <p>(2) Pihak pengadu dan anggota Perangkat Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan di hadapan sidang DKPPR FH Undip.</p> <p>(3) Saksi dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan keterangan termasuk memberikan dokumen atau alat bukti lainnya di hadapan sidang DKPPR FH Undip,</p>
--	--	--	--

			<p>(4) DKPPR FH Undip menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi pengaduan, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya melalui musyawarah majelis atau tim pemeriksa.</p> <p>(5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat serta wajib dilaksanakan.</p>
	<p>Penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip</p>	<p>Diperlukan adanya pengaturan mengenai Penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip lebih komprehensif mengenai pengaturan umum, sengketa antar peserta Pemira, sengketa peserta pemira dengan anggota perangkat Pemira, dan gugurnya permohonan penyelesaian sengketa proses Pemira.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMIRA FH UNDIP Bagian Kesatu Umum Pasal 73</p> <p>(1) BPPR FH Undip berwenang melakukan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip.</p> <p>(2) Sengketa Proses Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sengketa antar Peserta Pemira FH Undip; dan b. sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan anggota Perangkat Pemira FH Undip sebagai akibat

			<p>dikeluarkannya keputusan KPPR FH Undip.</p> <p>Pasal 74</p> <p>Penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip dilaksanakan dengan mekanisme acara cepat.</p> <p>Bagian Kedua</p> <p>Sengketa Antar Peserta Pemira</p> <p>Pasal 75</p> <p>Sengketa antar Peserta Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a terjadi karena ada hak Peserta Pemira FH Undip yang dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemira FH Undip lain pada tahapan proses Pemira FH Undip.</p> <p>Pasal 76</p> <p>BPPR FH Undip menyelesaikan sengketa antar Peserta Pemira FH Undip pada Hari yang sama pada saat permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip disampaikan.</p> <p>Pasal 77</p> <p>BPPR FH Undip menyelesaikan sengketa antar Peserta Pemira FH</p>
--	--	--	---

			<p>Undip melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. menerima permohonan;b. melakukan pemeriksaan permohonan;c. mempertemukan para pihak yang bersengketa;d. memeriksa bukti; dane. memutus <p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) BPPR FH Undip menerima permohonan sengketa antar-Peserta Pemira FH Undip yang disampaikan oleh Peserta Pemira FH Undip atas Peserta Pemira FH Undip lain.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.</p> <p>(3) Permohonan paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">a. identitas pemohon;b. identitas termohon; danc. kronologis tindakan termohon yang dianggap merugikan hak pemohon sebagai Peserta Pemira FH Undip. <p>(4) Permohonan dapat disertai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. keputusan KPPR FH Undip yang berkaitan dengan sengketa; dan/atau
--	--	--	--

			<p>b. bukti.</p> <p>(5) Penyampaian permohonan dapat diwakilkan oleh tim Kampanye Pemira FH Undip yang telah terdaftar di KPPR FH Undip.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) BPPR FH Undip melakukan pemeriksaan permohonan sebagaimana dalam Pasal 78 untuk menyelidiki kronologis tindakan termohon yang dianggap merugikan hak pemohon sebagai Peserta Pemira FH Undip.</p> <p>(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan dalam memutus permohonan sengketa antar-Peserta Pemira FH Undip.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) Dalam memutus permohonan penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), BPPR FH Undip mempertemukan para pihak yang bersengketa dan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.</p> <p>(2) Dalam hal pemohon dan termohon mencapai mufakat dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPR FH</p>
--	--	--	---

			<p>Undip menuangkan hasil kesepakatan ke dalam putusan penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemira FH Undip.</p> <p>(3) Dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai mufakat dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPR FH Undip wajib:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menuangkan ketidaksepakatan pemohon dan termohon ke dalam berita acara;b. memeriksa dan mengkaji kronologi atau bukti yang disertakan dalam permohonan sengketa; danc. memutus penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemira FH Undip. <p>(4) Materi hasil kesepakatan antara pemohon dan termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan peraturan ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Putusan sengketa antar Peserta Pemira FH Undip bersifat final dan mengikat.</p> <p>(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disebarluaskan melalui situs web BPPR FH Undip dan/atau media sosial BPPR FH Undip.</p> <p>(3) Situs web BPPR FH Undip dan media sosial BPPR FH Undip</p>
--	--	--	--

			<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dapat diakses oleh Mahasiswa dan Ormawa FH Undip.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) BPPR FH Undip menyiapkan salinan putusan sengketa antar-Peserta Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. diberikan kepada pemohon dan termohon; danb. diberikan kepada KPPR paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak putusan dibacakan. <p>(2) Penyampaian salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan tanda terima salinan putusan penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemira FH Undip.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Sengketa Peserta Pemira dengan Anggota Perangkat Pemira</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>Sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan anggota Perangkat Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b</p>
--	--	--	---

			<p>terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemira FH Undip dan/atau Peserta Pemira FH Undip yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPPR FH Undip sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPPR FH Undip pada tahapan Pemira tertentu.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Keputusan KPPR FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara.</p> <p>(2) Keputusan KPPR FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. keputusan KPPR FH Undip yang ditetapkan sebagai tindak lanjut atas putusan BPPR FH Undip mengenai penyelesaian Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip;b. keputusan KPPR FH Undip yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan BPPR mengenai penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip;c. keputusan KPPR FH Undip mengenai hasil penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemira FH Undip;d. keputusan KPPR FH Undip yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan TY FH Undip; dan
--	--	--	--

- e. keputusan KPPR FH Undip sepanjang mengenai perihal yang disengketakan telah diperiksa dan diputus oleh BPPR FH Undip.

Paragraf 2

Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Peserta Pemira dengan Penyelenggara Pemira

Pasal 85

Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan anggota Perangkat Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b terdiri atas:

- a. pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemira, yakni:
 1. bakal calon Senator FH Undip; dan/atau
 2. bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip; dan
- b. pihak yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemira FH Undip, yakni:
 1. calon Senator FH Undip; dan/atau
 2. pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip

			<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>Bakal calon Senator FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a angka 1 meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. bakal Calon Senator SM FH Undip yang didaftarkan kepada KPPR FH Undip namun yang bersangkutan tidak lulus Verifikasi Syarat; danb. bakal calon Senator FH Undip dinyatakan lulus Verifikasi Syarat namun yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai Calon Senator SM FH Undip. <p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan anggota Perangkat Pemira FH Undip adalah KPPR FH Undip.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Pihak terkait dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan penyelenggara Pemira FH Undip terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. calon Senator FH Undip; ataub. Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, yang berpotensi dirugikan haknya dengan adanya penyelesaian sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan anggota Perangkat Pemira FH Undip
--	--	--	---

			<p>(2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan untuk diikutsertakan dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan anggota Perangkat Pemira FH Undip.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Penyelesaian sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan penyelenggara Pemira FH Undip dapat melibatkan pihak pemberi keterangan.</p> <p>(2) Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Ormawa FH Undip;b. Mahasiswa; dan/atauc. Perangkat Pemira FH Undip. <p style="text-align: center;">Paragraf 3 Pelaksanaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) BPPR FH Undip berwenang menyelesaikan sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan anggota Perangkat Pemira FH Undip.</p> <p>(2) Penyelesaian sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan</p>
--	--	--	---

			<p>anggota Perangkat Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. menerima permohonan;b. mengkaji permohonan melalui verifikasi formil dan verifikasi materiil;c. melakukan mediasi antara pihak yang bersengketa;d. melakukan adjudikasi antara pihak yang bersengketa; dane. memutus penyelesaian sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan penyelenggara Pemira FH Undip. <p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>Tata cara pelaksanaan penyelesaian sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan anggota Perangkat Pemira FH Undip diatur lebih lanjut oleh BPPR FH Undip dengan pertimbangan SM FH Undip.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keempat</p> <p style="text-align: center;">Gugurnya Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemira</p> <p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip dinyatakan gugur jika:</p>
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none">a. pemohon yang merupakan bakal calon atau Calon Senator FH Undip meninggal dunia;b. pemohon yang merupakan bakal pasangan calon atau Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip meninggal dunia;c. terjadinya kesepakatan antara pemohon dan termohon sebelum atau saat dilakukannya tahapan penyelesaian sengketa proses Pemira FH Undip;d. pemohon tidak hadir dalam tahapan penyelesaian sengketa proses Pemira FH Undip setelah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 2 (dua) kali; ataue. pemohon mencabut permohonannya. <p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <ul style="list-style-type: none">(1) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemira FH Undip dinyatakan gugur oleh BPPR FH Undip melalui rapat pleno.(2) Putusan dari status gugurnya permohonan penyelesaian sengketa proses Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait.(3) Putusan gugurnya permohonan penyelesaian sengketa proses Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
--	--	--	---

			<p>disebarluaskan melalui situs web BPPR FH Undip dan/atau media sosial BPPR.</p> <p>(4) Situs web BPPR FH Undip dan media sosial BPPR FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dapat diakses oleh Mahasiswa dan Ormawa FH Undip.</p>
	<p>Penyelesaian Sengketa Hasil Pemira FH Undip</p>	<p>Dalam Perma FH Undip tentang Pemira yang sekarang berlaku, ketentuan mengenai penyelesaian Sengketa Hasil Pemira FH Undip belum diatur secara jelas dan lengkap, di antaranya seperti bagaimana berkas minimal yang wajib dipenuhi oleh pemohon dalam pengajuan Sengketa Hasil, dan bagaimana proses pemeriksaan yang perlu dilakukan.</p>	<p>Diatur ketentuan lebih lanjut, yakni:</p> <p>(1) Sengketa Hasil Pemira FH Undip meliputi hasil perselisihan antara KPPR FH Undip dan Peserta Pemira FH undip mengenai penetapan hasil Pemira FH Undip.</p> <p>(2) Sengketa penetapan hasil Pemira FH Undip meliputi sengketa penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan hasil Pemira FH Undip atas pemilihan Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip serta Calon Senator SM FH Undip independen.</p> <p>(1) Para pihak dalam Sengketa Hasil adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon; b. termohon; dan c. pihak lain <p>(2) Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Peserta Pemira FH Undip</p> <p>(3) Termohon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b</p>

			<p>merupakan KPPR FH Undip</p> <p>(4) Pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perseorangan Peserta Pemira FH Undip yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.</p> <p>Objek dalam Sengketa Hasil Pemira FH Undip adalah keputusan termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemira FH Undip yang mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2).</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Tahapan Penanganan Sengketa Hasil Pemira FH Undip</p> <p>Tahapan penanganan Sengketa Hasil Pemira FH Undip setidaknya-tidaknya memuat tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengajuan permohonan oleh pemohon;b. pemeriksaan permohonan Sengketa Hasil; danc. penyampaian hasil putusan TY FH Undip. <p>(1) Pengajuan permohonan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a diajukan kepada TY FH Undip secara:</p> <ol style="list-style-type: none">a. luring; ataub. daring
--	--	--	--

			<p>(2) Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada TY FH Undip dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah penetapan hasil Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip.</p> <p>(3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Peserta Pemira FH Undip.</p> <p>Pengajuan permohonan Sengketa Hasil Pemira FH Undip sekurang-kurangnya terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">a. permohonan;b. identitas pemohon;c. salinan keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemira FH Undip; dand. nama-nama pihak yang akan menjadi pendamping pemohon dalam penyelesaian Sengketa Hasil <p>(1) Dalam hal TY FH Undip telah menerima pengajuan permohonan Sengketa Hasil Pemira FH Undip sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98, TY FH Undip diberikan waktu selambat-lambatnya 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam</p>
--	--	--	---

			<p>sejak diterimanya pengajuan permohonan Sengketa Hasil Pemira FH Undip oleh TY FH Undip untuk memeriksa permohonan Sengketa Hasil yang diberikan.</p> <p>(2) Dalam hal ditemukannya kekurangan dalam permohonan Sengketa Hasil oleh TY FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TY FH Undip wajib menyampaikan kepada pemohon untuk dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan Sengketa Hasil Pemira FH Undip.</p> <p>(3) Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi permohonan Sengketa Hasil Pemira FH Undip sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak disampaikannya pemberitahuan perbaikan oleh TY FH Undip.</p> <p>(4) Dalam hal pemohon tidak mengirimkan kembali permohonan yang perlu diperbaiki dan dilengkapi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), maka permohonan dianggap tidak pernah diajukan.</p> <p>(5) Permohonan yang telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar permohonan Sengketa Hasil Pemira FH Undip</p>
--	--	--	--

			<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Pemeriksaan Perkara Sengketa Hasil Pemira FH Undip</p> <p>(1) Pemeriksaan perkara Sengketa Hasil Pemira FH Undip dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemeriksaan pendahuluan; dan b. pemeriksaan persidangan <p>(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TY FH Undip dalam bentuk sidang pleno yang bersifat terbuka untuk umum.</p> <p>Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian Sengketa Hasil Pemira FH Undip diatur lebih lanjut dalam Pedoman Beracara TY FH Undip.</p>
	Pelaksanaan Pemira Ulang	Diperlukan adanya ketentuan mengenai pelaksanaan pemira ulang.	<p style="text-align: center;">BAB XI</p> <p style="text-align: center;">PELAKSANAAN PEMIRA ULANG</p> <p style="text-align: center;">Pasal 103</p> <p>(1) Apabila setelah diadakan penghitungan jumlah suara, jumlah Pemilih yang menggunakan hak suaranya kurang dari 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah total DPT, maka akan diadakan Pemira FH Undip ulang hanya untuk Pemungutan Suara Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip.</p>

			<p>(2) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dan tidak adanya Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip yang mendapat suara lebih dari 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) dari total suara sah pada Pemira FH Undip, maka akan diadakan Pemira FH Undip putaran kedua hanya untuk Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.</p> <p>(3) Pelaksanaan ulang Pemira FH Undip atau putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sejak pelaksanaan Pemira FH Undip sebelumnya.</p> <p>(4) Waktu dan mekanisme pelaksanaan Pemira FH Undip ulang atau putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh KPPR FH Undip.</p>
	Mekanime Alternatif	Diperlukan adanya ketentuan mengenai mekanisme alternatif.	<p style="text-align: center;">BAB XII MEKANISME ALTERNATIF Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>(1) Mekanisme alternatif Pemira FH Undip dapat dilakukan dalam</p>

			<p>hal:</p> <ol style="list-style-type: none">a. tidak terdapat bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip;b. jumlah suara kotak kosong melebihi atau sama dengan Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip; dan/atauc. tidak terpenuhinya jumlah kursi minimum Calon Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat 6. <p>(2) Mekanisme alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah mahasiswa.</p> <p>(3) Musyawarah mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan forum pembahasan untuk menghasilkan suatu ketetapan melalui mekanisme sidang yang diselenggarakan oleh SM FH Undip.</p> <p>(4) Musyawarah mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar permohonan dari KPPR FH Undip kepada SM FH Undip melalui surat permohonan KPPR FH Undip yang dikirim melalui surat elektronik.</p> <p>(5) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diterimanya permohonan dari KPPR FH Undip, SM FH Undip wajib menyelenggarakan musyawarah mahasiswa.</p>
--	--	--	--

			<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Peserta</p> <p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(1) Peserta musyawarah mahasiswa sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 104 ayat (2) terbagi menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. peserta penuh; danb. peserta peninjau. <p>(2) Peserta penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. satu orang perwakilan SM FH Undip;b. satu orang perwakilan BEM FH Undip;c. satu orang perwakilan dari tiap UKM FH Undip;d. satu orang perwakilan dari Mahasiswa semester 1 sampai semester 2;e. satu orang perwakilan dari Mahasiswa semester 3 sampai semester 4;f. satu orang perwakilan dari Mahasiswa semester 5 sampai semester 6; dang. satu orang perwakilan Mahasiswa dari luar kampus utama.
--	--	--	---

			<p>(3) Peserta penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai hak suara dan hak bicara.</p> <p>(4) Penggunaan hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh SM FH Undip, BEM FH Undip, dan UKM FH Undip dalam musyawarah mahasiswa dilakukan oleh ketua atau perwakilan Ormawa FH Undip yang bersangkutan.</p> <p>(5) Dalam hal penggunaan hak suara dilakukan oleh perwakilan Ormawa FH Undip yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perwakilan Ormawa FH Undip yang bersangkutan wajib memberikan surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua Ormawa FH Undip terkait.</p> <p>(6) Penggunaan hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Mahasiswa dari tiap angkatan dan Mahasiswa dari luar kampus utama dalam musyawarah mahasiswa dilakukan oleh 1 (satu) orang perwakilan.</p> <p>(7) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diketahui identitasnya sejak sebelum musyawarah mahasiswa diselenggarakan.</p> <p>(8) Peserta peninjau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Mahasiswa yang hadir dan bukan merupakan perwakilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 ayat (2).</p> <p>(9) Peserta peninjau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b</p>
--	--	--	---

			<p>mempunyai hak bicara.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Pengambila Keputusan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(1) Musyawarah mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dapat dilaksanakan apabila telah dihadiri oleh setengah dari jumlah peserta penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2).</p> <p>(2) Pengambilan keputusan dalam musyawarah mahasiswa dilakukan melalui musyawarah mufakat.</p> <p>(3) Pengambilan keputusan dalam musyawarah mahasiswa dilakukan melalui musyawarah mufakat.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keempat Usulan dalam Musyawarah Mahasiswa</p> <p style="text-align: center;">Pasal 107</p> <p>(1) Pemberian usul Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip serta Calon Senator SM FH Undip dalam musyawarah mahasiswa dapat dilakukan oleh peserta penuh.</p>
--	--	--	--

			<p>(2) Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip serta Calon Senator SM FH Undip yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib hadir pada saat musyawarah mahasiswa diselenggarakan.</p> <p>(3) Musyawarah mahasiswa dalam mengambil keputusan wajib mempertimbangkan alasan-alasan kesediaan atau ketidaksediaan Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip serta Calon Senator SM FH Undip yang diusulkan.</p> <p>(4) Dalam hal musyawarah mahasiswa diselenggarakan atas dasar alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 ayat (1) huruf b, maka Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip yang diusulkan tidak boleh merupakan pasangan calon yang memiliki suara lebih rendah dari jumlah suara kotak kosong dalam Pemira FH Undip sebelumnya.</p>
	Keamanan Data Pasca Pelaksanaan Pemira FH Undip	Diperlukan adanya ketentuan mengenai keamanan data pasca pelaksanaan Pemira FH Undip secara komprehensif	<p style="text-align: center;">BAB XIII</p> <p style="text-align: center;">KEAMANAN DATA PASCA PELAKSANAAN PEMIRA FH UNDIP</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>Pemusnahan data adalah kegiatan memusnahkan data yang tidak</p>

			<p>mempunyai nilai kegunaan dan telah melampaui jangka waktu penyimpanan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>Pemusnahan data dilakukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. prinsip pemusnahan data; danb. kriteria data yang dimusnahkan. <p style="text-align: center;">Pasal 110</p> <p>Prosedur pemusnahan data dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. penyeleksian data;b. pembuatan daftar data usul musnah;c. persetujuan pemusnahan dari ketua KPPR FH Undip;d. penetapan data yang akan dimusnahkan; dane. pelaksanaan pemusnahan data. <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Prinsip Pemusnahan Data</p> <p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>(1) Pemusnahan data menjadi tanggung jawab sekretaris jenderal</p>
--	--	--	---

			<p>KPPR FH Undip.</p> <p>(2) Pemusnahan data hanya dapat dilakukan oleh sekretaris jenderal KPPR FH Undip setelah usainya pelaksanaan Pemira FH Undip dan disetujui oleh Ketua KPPR FH Undip.</p> <p>(3) Secara fisik dan non-fisik pemusnahan data dapat dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau di tempat lain di bawah koordinasi dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal KPPR FH Undip yang bersangkutan.</p> <p>(4) Pemusnahan data dilakukan secara total sehingga tidak dikenal lagi nilai guna baik fisik maupun informasinya.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Kriteria yang Dimusnahkan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>Pemusnahan data dilakukan terhadap data yang:</p> <ol style="list-style-type: none">a. tidak lagi memiliki nilai guna;b. telah habis retensi dan berketerangan dimusnahkan; danc. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses sengketa. <p style="text-align: center;">Bagian Keempat Prosedur Pemusnahan</p>
--	--	--	--

			<p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>(1) Penyeleksian data dilakukan oleh sekretaris jenderal KPPR FH Undip berdasarkan nilai guna dan retensi data tersebut.</p> <p>(2) Tahapan penyeleksian data sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memilah data dari non-data, termasuk non-data adalah duplikasi yang berlebihan; amplop, map, blanko formulir, dan duplikasi lain yang tidak mengandung informasi pelengkap data;b. menata data dan mengelompokkannya sesuai dengan kegunaanya dan tahapan pelaksanaannya; danc. mengelompokkan data ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu data yang akan disimpan dan dimusnahkan. <p>(3) Hasil penyeleksian data dituangkan dalam daftar data usul musnah dengan identitas data yang ditentukan oleh KPPR FH Undip.</p> <p>(4) Persetujuan pemusnahan daftar data usul dilakukan oleh ketua KPPR FH Undip.</p> <p>(5) Sekretaris jenderal KPPR FH Undip mengeluarkan penetapan terhadap daftar usul musnah yang telah disetujui oleh ketua KPPR FH Undip.</p>
--	--	--	---

			<p style="text-align: center;">Pasal 114</p> <p>(1) Pelaksanaan pemusnahan data berdasarkan daftar data usul musnah yang telah ditetapkan oleh sekretaris jenderal KPPR FH Undip yang disetujui oleh ketua KPPR FH Undip.</p> <p>(2) Pelaksanaan pemusnahan data dilakukan dengan membuat berita acara pemusnahan dan ditandatangani oleh ketua KPPR FH Undip.</p> <p>(3) Pelaksanaan pemusnahan data dilakukan secara total sehingga tidak dikenal lagi baik fisik maupun informasinya.</p> <p>(4) Pemusnahan dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pembakaran;b. pencacahan;c. penggunaan bahan kimia; dand. cara-cara lain yang memenuhi kriteria yang disebut dengan istilah musnah. <p>(5) Pelaksanaan pemusnahan data disaksikan oleh perwakilan dari seluruh Peserta Pemira FH Undip.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kelima Penyimpanan Data</p>
--	--	--	--

			<p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>Segala bentuk data yang telah disepakati untuk disimpan agar dapat diinventarisasikan kepada SM FH Undip melewati suatu rapat yang diinisiasi oleh SM FH Undip meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. notulen rapat KPPR FH Undip pemusnahan data pada saat melakukan penyeleksian daftar data usul musnah; b. surat keputusan pemusnahan daftar data usul musnah; c. surat keputusan pelaksanaan pemusnahan data; d. berita acara pemusnahan; dan e. daftar inventarisasi masalah.
	Ketentuan Peralihan	Diperlukan ketentuan peralihan dalam setiap Perma FH Undip	<p>Diatur ketentuan lebih lanjut, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya dinyatakan tidak berlaku. (2) Dalam hal di kemudian Hari terdapat perubahan kondisi yuridis yang menyebabkan adanya peniadaan UKM FH Undip tertentu dan/atau luar kampus utama, maka penetapan hasil Pemira FH Undip untuk Senator SM FH Undip perwakilan

			UKM FH Undip dan/atau Senator SM FH Undip perwakilan luar kampus utama yang bersangkutan dianggap gugur.
	Ketentuan Penutup	Diperlukan ketentuan penutup yang menjelaskan bagaimana dan kapan pemberlakuan Perma FH Undip tentang Pemira kali ini.	<p>Diatur ketentuan lebih lanjut, yakni:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 116</p> <p>(1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat lembaga peradilan atau lembaga yudikatif di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan/atau Universitas Diponegoro yang mengatur hal serupa dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, maka ketentuan yang serupa di dalam peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.</p>